HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
30 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

SELASA, 10 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

NASIONAL

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.25 WIB



Gibran Rakabuming Raka terlihat mengenakan jas biru tua dan peci hitam sambil menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Di latar belakang, tampak deretan bendera Indonesia dan interior gedung yang formal dengan aksen kayu dan karpet merah. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 21
HIBURAN 24
Aneka Berita 26

NASIONAL

Kronologi Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu tadi pagi.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis Semprot Gibran: Kalau Mau Mundur, Jangan Cek Ombak ke Prabowo!



BANDA ACEH - Aktivis Nicho Silalahi mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai Gibran seharusnya tidak melakukan manuver Politik dengan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto jika memang sudah memiliki keputusan untuk meninggalkan jabatan.Pernyataan tersebut disampaikan Nicho melalui akun X miliknya …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR



BANDA ACEH - Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR karena mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi antarparlemen di tingkat internasional.

Selengkapnya di halaman 4 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mensesneg: Prabowo Tak Tolak Pengajuan Mundur Gibran dari Posisi Wapres



BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya saat ini.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai mengonfirmasi pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

42 BERITA

NASIONAL

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.25 WIB



Gibran Rakabuming Raka terlihat mengenakan jas biru tua dan peci hitam sambil menangkupkan tangan sebagai tanda hormat. Di latar belakang, tampak deretan bendera Indonesia dan interior gedung yang formal dengan aksen kayu dan karpet merah. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Gibran Rakabuming Raka disebut berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.

"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjut Pras.

"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN."

Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan Politik yang menguat di parlemen.

Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

NASIONAL

Kronologi Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.36 WIB



Foto memperlihatkan Prabowo Subianto yang duduk di kursi kulit sedang bersalaman dengan Gibran Rakabuming Raka yang berdiri membungkuk dengan hormat. Keduanya mengenakan

BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

Prasetyo membenarkan kabar yang beredar bahwa Gibran dan Prabowo bertemu tadi pagi. Ia menyebut pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.

Namun, Prasetyo tidak menjelaskan lokasi pertemuan Gibran dan Prabowo.

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK (Mahkamah Konstitusi) maupun di MA (Mahkamah Agung)," kata Prasetyo.

"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," lanjutnya.

Namun di dalam diskusi, lanjut Prasetyo, Prabowo banyak memberikan saran kepada Gibran.

"Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan kebasahan-keabsahan yang dimiliki melalui proses di PTUN," ujarnya.

Ihwal dinamika Politik yang terjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Prasetyo menilainya sebagai proses politik yang harus dihormati.

"Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR, ya. Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Nah, kami tentu saja menghormati," katanya.

NASIONAL

Soal Absennya Idham Azis di Hambalang, Tito Irit Bicara

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.36 WIB

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, memilih irit bicara saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai ketidakhadiran mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Idham Azis dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran purnawirawan perwira tinggi Polri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) malam.Tito mengaku tidak mengetahui secara rinci alasan di balik absennya Idham Azis dalam agenda silaturahmi tersebut. Sementara Tito menegaskan, kehadirannya di Hambalang murni karena memenuhi undangan resmi dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.

“Saya nggak tahu, saya yang diundang. Otomatis saya hadir, udah itu aja,” kata Tito yang juga mantan Kapolri, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Ketika awak media kembali mencecarnya dengan pertanyaan seputar apakah status hukum mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi tersangka turut dibahas dalam pertemuan tertutup itu, Tito kembali menolak memberikan ulasan lebih lanjut.

“Udah itu aja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tito memaparkan, pertemuan di Hambalang tersebut merupakan forum konsolidasi kebangsaan dan silaturahmi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memaparkan berbagai persoalan strategis bangsa, termasuk atensi khusus terhadap pencegahan kebocoran keuangan negara.

“Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi kebocoran negara dan lain-lain,” lanjut Tito.

Ia menambahkan, pihak Persatuan Purnawirawan (PP) Polri pada prinsipnya menyatakan komitmen dan dukungan penuh terhadap seluruh program strategis pemerintahan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” jelasnya.

Bayang-Bayang Skandal Penyadapan Ilegal

Di sisi lain, dinamika internal penegak hukum dan institusi kepolisian tengah bergejolak menyusul kian memanasnya skandal penyadapan ilegal (illegal tapping) yang dilaporkan menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Di tengah proses penyidikan maraton yang ditangani Bareskrim Polri, spekulasi Politik kian meluas dengan mencuatnya kembali nama-nama eks pimpinan Polri.

Polemik ini kian meruncing seusai mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membongkar penangkapan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Raja Juli dan Giring Mendadak Mundur dari PSI, Ini Sebabnya

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.01 WIB

BANDA ACEH - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli di PSI menjabat Sekretaris Jenderal. Sementara Giring sebatas anggota partai.

"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep," kata Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 November 2026.

Raja Juli menjelaskan, langkah mundur dari jajaran pengurus partai tersebut diambil agar ia dapat mendedikasikan seluruh waktunya untuk mengawal program-program prioritas pemerintah di sektor kehutanan.

"Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai. Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tito Karnavian Bantah Dicekal dan Rumahnya Jadi Tempat Kumpul Listyo Cs

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.07 WIB



BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah dirinya mendapat surat pencekalan ke luar negeri.Kabar tersebut dikonfirmasi Tito buntut adanya kabar yang menyebut dirinya dicekal karena

tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Hoaks Munaslub Golkar Diduga Digerakkan Kader Internal, Doli Sudah Kantongi Inisial

“Saya di sini, ke mana? Enggak ada (surat pencekalan),” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Tito menyebut banyak informasi tidak benar yang beredar di media sosial, termasuk kabar mengenai pertemuan dengan Listyo cs di rumahnya.

“Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya. Ada yang bilang lagi bahwa apa, katanya kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Widya Chandra 4. Rumah saya kan Widya Chandra 1.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mensesneg: Prabowo Tak Tolak Pengajuan Mundur Gibran dari Posisi Wapres

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.44 WIB



Presiden Prabowo Subianto tampak duduk di meja rapat utama yang dihiasi lambang Garuda dan tulisan 'KABINET MERAH PUTIH'. Di sebelahnya, Gibran Rakabuming Raka sedang berdiri sambil memegang sandaran kursi. Keduanya kompak mengenakan kemeja putih dalam pertemuan resmi tersebut. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tidak menolak permohonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya saat ini.

Hal itu disampaikan Prasetyo usai mengonfirmasi pertemuan antara Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di kawasan Widya Candra, Jakarta Selatan.

"Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo dalam konferensi pers, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (10/11/2026).

Meski begitu, Prasetyo juga tidak dengan gamblang menyebutkan bahwa Prabowo menerima pengunduran diri Gibran.

Prasetyo hanya memastikan, saat ini Gibran masih berstatus sebagai wakil presiden.

Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga disebut memberikan sejumlah saran dalam diskusi tersebut.

Namun, Prabowo tidak menetapkan tenggat waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumennya.

"Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara," ujarnya.

Saat ditanya apakah Prabowo memberikan batas waktu tertentu kepada Gibran, Prasetyo menegaskan tidak ada tenggat yang ditetapkan.

"Tidak (ada tenggat waktu)," katanya singkat.

Di sisi lain, Prasetyo juga belum dapat memastikan apakah pemerintah akan memberikan bantuan hukum kepada Gibran terkait persoalan tersebut.

"Belum, belum, belum. Data yang kami sampaikan hanya mengenai apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden," tutur dia.

Sementara itu, Prasetyo memastikan pemerintahan tetap berjalan di tengah dinamika Politik yang berkembang.

Prabowo disebut tetap fokus menjalankan tugas sebagai kepala negara dan memimpin agenda pemerintahan.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian Prabowo adalah mitigasi bencana menjelang musim hujan.

Pemerintah mulai memetakan potensi bencana berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), termasuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan agar tidak kembali terjadi pada tahun depan.

"Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas," ujarnya.

NASIONAL

Bukan Sekadar Sadap Prabowo, Yusril Ungkap Dugaan Upaya Melumpuhkan Presiden

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.30 WIB

BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto semakin serius. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar, termasuk kemungkinan adanya upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan pemerintahan.Yusril menegaskan, penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana siber biasa. Pasalnya, yang menjadi sasaran bukan sekadar Prabowo sebagai individu, melainkan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.

"Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa," kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Yusril, kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan penyidikan.

Ia menjelaskan, penyadapan terhadap Presiden memiliki konsekuensi yang lebih luas karena berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan kepala negara.

"Jabatannya melekat dengan jabatannya bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden," ujarnya.

Yusril mengatakan, pendalaman kasus penyadapan kini tidak hanya diarahkan untuk membuktikan tindak pidana intersepsi elektronik tanpa hak, tetapi juga mencari tahu tujuan sebenarnya dari praktik tersebut.

Salah satu kemungkinan yang sedang ditelusuri penyidik adalah apakah penyadapan itu dilakukan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya.

Untuk mendalami kemungkinan tersebut, pemerintah telah melibatkan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara guna mengkaji keterkaitan perkara penyadapan dengan ketentuan tindak pidana makar.

Dari kajian tersebut, muncul kemungkinan penerapan Pasal 191 hingga Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

"Karena itu penyadapan terhadap orang presiden, tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa," tegas Yusril.

Ia kemudian menjelaskan bahwa ketentuan makar tidak hanya berkaitan dengan tindakan menggulingkan pemerintahan, tetapi juga perbuatan yang bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan pemerintahan.

"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis Semprot Gibran: Kalau Mau Mundur, Jangan Cek Ombak ke Prabowo!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 22.54 WIB



BANDA ACEH - Aktivis Nicho Silalahi mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai Gibran seharusnya tidak melakukan manuver Politik dengan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto jika memang sudah memiliki keputusan untuk meninggalkan jabatan.Pernyataan tersebut disampaikan Nicho melalui akun X miliknya, Selasa (10/11/2026). Dalam unggahannya, Nicho menyindir dugaan niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan kepada Prabowo.

Menurut Nicho, Gibran kemungkinan berharap Presiden Prabowo akan mencegah pengunduran dirinya sekaligus memberikan perlindungan politik menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan publik.

“Si Anak haram konstitusi Gibran berniat mundur dan menyampaikan kepada Presiden @prabowo. Mungkin dia berharap dalam hatinya untuk dicegah dan dilindungi, karena presiden memiliki hak prerogatif jadi bisa melindunginya dari putusan @officialMKRI dan @MahkamahAgung,” tulis Nicho.

Ia kemudian melontarkan kritik keras agar Gibran tidak melakukan manuver politik apabila memang serius ingin mengundurkan diri.

“Eh bengak, kalau niat mundur ya mundur aja. Nggak usah berakrobatik sambil cek ombak,” sindirnya.

Lebih jauh, Nicho menyarankan Gibran segera mengundurkan diri apabila masih memiliki etika dan moral dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Desakan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung mengenai Surat Keterangan (Suket) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.

Dalam unggahannya, Nicho menyebut MA telah menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Ia menilai putusan tersebut semestinya menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan wakil presiden.

“Ingat ya, apa pun yang dihasilkan dari dasar ilegal maka keseluruhannya akan menjadi ilegal pula. Sama seperti dirimu yang tidak memiliki ijazah SMA/sederajat, tetapi menggunakan Suket untuk pendaftaran ke KPU. Tapi dibatalkan MA,” tulisnya.

Nicho bahkan mempertanyakan legitimasi pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Ia berpendapat masyarakat berhak mempertanyakan keabsahan proses pencalonan tersebut setelah adanya putusan MA.

Tidak berhenti sampai di situ, Nicho juga menyinggung Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Melalui unggahannya, ia mempertanyakan bagaimana sikap Gerindra dan Dasco terhadap persoalan yang menyeret nama Gibran tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bakal Dipilih Prabowo? Ini 3 Nama Besar yang Berpotensi Gantikan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 21.56 WIB

BANDA ACEH - Pengamat Politik Refly Harun mengungkapkan tiga sosok dari partai Politik yang dinilai berpotensi dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Menurut Refly, ketiga tokoh tersebut adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Selain ketiga nama tersebut, Refly juga menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai salah satu calon potensial. Namun, ia mengaku kurang yakin dengan peluang Bahlil karena menilai posisi kepemimpinan di Partai Golkar relatif mudah berganti.

"Jadi dari spektrum partai politik itu kita harus menaruh AHY dan Puan serta Zulkifli Hasan sebagai yang terdepan plus …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.57 WIB



BANDA ACEH - Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR karena mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi antarparlemen di tingkat internasional.

Kholid menjelaskan, Hidayat ditugaskan memperkuat kerja sama parlemen Indonesia dengan berbagai negara, khususnya negara-negara Islam. Selain itu, diplomasi tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan. PKS memandang penugasan tersebut sebagai tanggung jawab penting untuk meningkatkan kontribusi Indonesia di panggung internasional.

Dia menilai hubungan dengan parlemen negara-negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara Islam, perlu diperkuat agar solidaritas dapat diwujudkan menjadi kerja sama dan langkah diplomasi konkret. Jangkauan diplomasi juga perlu diperluas kepada negara-negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia.

“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” tegasnya.

Kholid menambahkan, diplomasi untuk Palestina perlu diarahkan pada hasil nyata, mulai dari perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, hingga dukungan bagi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid.

Dia juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian Hidayat Nur Wahid selama menjalankan amanah sebagai Wakil Ketua MPR RI.

“PKS menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian beliau di MPR RI. Kami mendukung beliau mengemban amanah baru untuk memperkuat persahabatan antarbangsa, memperjuangkan kepentingan nasional, dan menghadirkan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia,” ujar Kholid.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring dan Raja Juli Cabut dari PSI, Prabowo Didesak Sekalian Tendang dari Kabinet

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.25 WIB

BANDA ACEH - Keputusan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai kritik keras. Presiden Prabowo Subianto bahkan didesak sekalian mencopot keduanya dari Kabinet Merah Putih.Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. Ia menilai pengunduran diri dua tokoh partai pimpinan Kaesang Pangarep itu tidak cukup jika keduanya masih mempertahankan jabatan di pemerintahan.

"Presiden perlu bersikap, kabinet harus bersih dari kader PSI, demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik," kata Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dedi menilai keputusan Giring dan Raja Juli meninggalkan aktivitas kepartaian tidak bisa dilepaskan dari situasi Politik yang tengah berkembang. Ia bahkan menyebut keduanya sebagai sosok oportunis yang tidak memiliki kemandirian dalam menentukan sikap politik.

"Secara pribadi Giring mundur patut dipuji, ia cermat melihat peluang, tetapi memalukan dari sisi lainnya. Giring akan ditinggalkan oleh pihak manapun, karena oportunis. Artinya Raja Juli pun serupa Giring, sama-sama tidak miliki kemandirian," ujarnya.

Menurut Dedi, kedua pejabat tersebut semestinya tidak hanya mundur dari PSI, tetapi juga melepaskan jabatan di kabinet. Ia beralasan Giring dan Raja Juli sebelumnya menduduki posisi pemerintahan dengan latar belakang sebagai kader partai tersebut.

Dedi juga mengaitkan keputusan keduanya dengan berbagai polemik politik yang belakangan menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Ia menduga rangkaian persoalan tersebut membuat sejumlah kader PSI mulai menghitung ulang posisi politiknya.

"Giring (dan Raja Juli) oportunis, ia tahu PSI dalam situasi terancam di kabinet, pemalsuan dokumen pendidikan Gibran, terungkapnya skandal penyadapan, juga bergulirnya sidang ijazah palsu Jokowi, menjadi alasan kuat Giring alami ketakutan sebagai kader PSI, ini dimaklumi karena Giring memang bukan aktivis, ia masuk politik dengan privilege, sehingga tidak akan mampu hadapi masalah …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

IPW Tolak Usulan Listyo Sigit Diadili di Pengadilan Militer: Polisi Tunduk Peradilan Umum

Oleh Redaksi · 10 Nov, 22.01 WIB



BANDA ACEH - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menolak wacana yang mengusulkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diadili di pengadilan militer terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena anggota Polri tunduk pada peradilan umum.

"Mengusulkan Mahkamah Militer itu enggak benar sama sekali. Karena kalau mau mengadili Saudara LSP, undang-undang sudah menyatakan polisi itu tunduk pada peradilan umum. Kalau kemudian dikatakan dia harus dimahmilkan, dia bukan militer, sistem ketatanegaraan kita (sudah jelas)," ujar Sugeng dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "'Dewan Jenderal' Sadap Presiden, Ada Dalangnya?" yang ditayangkan di iNews, Selasa (10/11/2026).

Sugeng menilai, penanganan perkara terhadap Listyo Sigit harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Dia juga meminta masyarakat memahami aturan mengenai kewenangan lembaga peradilan agar tidak muncul pemahaman yang keliru.

"Ya kalau saya kan hukum ya, saya bicara hukum nih supaya masyarakat kita itu diliterasi dengan benar, bukan ngoceh gitu loh ya. Coba kasih kalau ada argumentasi hukumnya, saya pun ikut gitu loh," tuturnya.

Kasus ini bermula dari penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Di tengah proses hukum tersebut, muncul perdebatan mengenai forum peradilan yang berwenang mengadili para perwira tinggi Polri, termasuk usulan agar perkara ditangani melalui Mahkamah Militer.

Saat ditanya apakah warga sipil atau anggota kepolisian mutlak tidak dapat diadili di Mahkamah Militer, Sugeng menjelaskan terdapat pengecualian melalui mekanisme peradilan koneksitas.

"Ya iya dong, kecuali kalau koneksitas ini sudah benar koneksi," katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025-2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mengejutkan, Tiba-tiba Raja Juli Antoni Mundur dari PSI

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.58 WIB

BANDA ACEH - Menteri Kehutanaan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Keputusan itu telah disampaikan langsung Raja Juli kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Raja Juli mengungkapkan alasan mundur dari PSI. Dia mengaku ingin fokus bekerja di pemerintahan.

"Alasannya hanya satu. Saya ingin 'full time' dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan," ujar Raja Juli.

"Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla," imbuhnya.

Raja Juli mengatakan Kaesang menerima alasan pengunduran dirinya.

"Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama," pungkasnya.

NASIONAL

Ke Mana Idham Azis? Tito Irit Bicara, Da'i Bachtiar Mengaku Tak Tahu

Oleh Redaksi · 10 Nov, 20.55 WIB



BANDA ACEH - Absennya mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Idham Azis dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, masih menjadi sorotan.Diketahui, beberapa hari yang lalu, Prabowo menemui 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

Pertemuan Prabowo dengan purnawirawan pimpinan Polri itu berlangsung di tengah mencuatnya isu penyadapan komunikasi Presiden yang diduga melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang tengah terjadi.

Ke- 10 mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan tersebut, adalah:

Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Dari Mantan Kapolri dalam hampir 30 tahun terakhir tersebut, hanya Jenderal Purnawirawan Idham Aziz yang tidak tampak hadir.

Keberadaan Idham Azis yang menjabat sebagai Kapolri sejak 1 November 2019 hingga 27 Januari 2021 ini pun menuai tanda tanya.

Terlebih hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Idham Azis terkait ketidakhadirannya dalam pertemuan tersebut.

Lantas, sebenarnya ke mana Idham Azis? Berikut penjelasan dari dua mantan Kapolri, dirangkum Tribunnews.com:

Tito Karnavian Irit Bicara

Tito Karnavian adalah Kapolri periode 14 Juli 2016 - 23 Oktober 2019.

Ia ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang kala itu akan segera pensiun.

Pada 22 Oktober 2019, Kapolri Tito diberhentikan dengan hormat oleh Jokowi melalui surat yang ditujukan kepada DPR-RI dan disetujui DPR.

Sehari kemudian, ia dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri ke-29 dalam Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024.

Jabatan ini terus berlanjut di era Prabowo. Dan pada 5 November 2024, Tito juga diangkat oleh Prabowo menjadi Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Setelah tak lagi menjabat sebagai Kapolri, posisinya kemudian digantikan Idham Azis.

Menanggapi ketidakhadiran suksesornya tersebut, Tito Karnavian memilih untuk tidak memberikan penjelasan.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan absennya Idham Azis.

Tito hanya menyebut, kehadirannya dalam pertemuan bersama para Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) di Hambalang tersebut didasari oleh undangan yang ia terima.

"Bapak Idham Azis, saya enggak tahu (kenapa absen). Saya diundang, otomatis saya hadir, dan itu aja," ungkap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (9/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keracunan MBG Kembali Terjadi di Cirebon, DPRD Minta Dapur Penyedia Makanan Dihentikan

Oleh Van · 10 Nov, 23.26 WIB



CIREBON — Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kota Cirebon, Senin, 9 November 2026. Sebanyak 25 siswa terdampak setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Harjamukti 01.

"Di sini kami kecewa. Harus ada sanksi," kata anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, saat meninjau dapur penyedia makanan tersebut.

DPRD meminta Wali Kota Cirebon menghentikan sementara operasional SPPG Harjamukti 01. Para siswa yang terdampak juga telah dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan penanganan.

Baru Lima Hari Sepakat Perbaiki Pengawasan

Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi hanya lima hari setelah seluruh pengelola dapur MBG di Kota Cirebon menandatangani komitmen tertulis untuk mematuhi aturan keamanan pangan.

Komitmen itu dibuat pada 4 November 2026. Isinya antara lain mewajibkan pengelola menggunakan bahan baku segar, memastikan asal bahan dapat ditelusuri, serta mengolah makanan langsung di dapur masing-masing.

Namun, insiden kembali terjadi di SPPG Harjamukti 01. Dapur tersebut diketahui memasok hingga 2.500 porsi makanan setiap hari untuk 14 sekolah di wilayah Harjamukti.

Umar menilai pengawasan dan tanggung jawab penyedia makanan perlu diperkuat. Menurut dia, pertanggungjawaban tidak cukup hanya dibebankan kepada kepala dapur, tetapi juga perlu melibatkan yayasan dan mitra penyelenggara.

Bukan Kasus Pertama di Cirebon

Sebelumnya, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SPPG Kalijaga 05 pada Oktober 2026.

DPRD mencatat 395 orang terdampak dalam insiden tersebut, dengan 218 orang masih menjalani perawatan saat data disampaikan pada 26 Oktober.

DPRD menyebut kepala SPPG Kalijaga 05 telah diberhentikan dan dapurnya ditutup. Kini, kejadian serupa kembali membuat pengawasan seluruh penyedia makanan MBG di Cirebon dipertanyakan.

Koordinator Wilayah BGN Kota Cirebon, Yoga Adijaya, menyampaikan permohonan maaf kepada siswa dan orang tua. Sementara itu, DPRD meminta evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Penyebab pasti kejadian terbaru masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Yang menjadi perhatian, pengawasan makanan harus berjalan sebelum menu sampai ke tangan siswa, bukan baru diperketat setelah anak-anak jatuh sakit.(*)

NASIONAL

6 Presiden Sebelumnya Tak Berani Sentuh Oligarki Perampok Negara, Cuma Baru Prabowo

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.03 WIB

BANDA ACEH - Aktivis/Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu melontarkan pujian setinggi langit atas keberanian dari Presiden Prabowo Subianto.Menurut Said Didu, Prabowo hanya satu-satunya kepala negara yang memiliki nyali untuk mengusik dan membongkar hegemoni kelompok oligarki "perampok negara" yang selama puluhan tahun menyandera kedaulatan ekonomi daru Indonesia.

Ia membeberkan betapa mengguritanya kekuatan oligarki saat ini. Ekspansi mereka tak lagi sebatas mengeruk sumber daya alam, melainkan telah mencaplok kawasan perkotaan yang strategis.

"Dulu mereka cuma ada di hutan. Mengambil tanah hutan, mengambil tambang. Sekarang sudah ada di kota mengambil semuanya," beber Said Didu dikutip Senin (9/11/2026).

Said Didu menegaskan bahwa kelompok ini nyaris tak tersentuh oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, dominasi absolut itu perlahan diruntuhkan di era pemerintahan saat ini.

"Saya mengalami enam presiden sebelumnya, tidak ada yang berani menyentuh mereka, oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo berani menyentuh mereka. Hidup Prabowo!" serunya.

Bagi Said Didu, langkah berani pemerintahan saat ini adalah momentum emas bagi rakyat untuk merebut kembali kedaulatan negaranya. Ia mendesak agar seluruh elemen masyarakat bersatu melawan hegemoni tersebut.

Tak lupa, ia juga memberikan peringatan keras kepada para "penumpang gelap" atau kaki tangan oligarki yang saat ini masih bercokol di lingkaran Istana. Ia mendesak para penghubung tersebut untuk segera bertobat dan angkat kaki dari sekitar presiden jika tidak ingin berhadapan langsung dengan kemarahan rakyat.

Prabowo sendiri tengah diterpa polemik terkait dirinya menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Fraksi PAN di MPR Minta Gibran Mundur Sukarela

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.07 WIB

BANDA ACEH -Fraksi PAN MPR RI tegas meminta ada tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MA telah mengabulkan kasasi gugatan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan pada Pemilu Presiden 2024 tidak sah.

Untuk itu, menurut Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, Putusan MA tersebut bersifat eksekutorial sehingga harus dieksekusi. Sebab, Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden pasca dibatalkan syarat tersebut.

"Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung.," kata Sudding kepada wartawan, Senin 9 November 2026.

"Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur Politik," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan Gibran sebaiknya meletakkan jabatannya secara suka rela demi menghormati peradilan, karena sudah tidak memiliki legitimasi pasca diputus tidak sah oleh MA.

"Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik," jelas dia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PDIP Heran Gibran Niat Mundur tapi Ingin Buktikan Ijazah di PTUN: Mau Ulur Waktu

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.12 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus heran dengan langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri, tetapi meminta waktu untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Deddy menilai, putusan PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurut dia, PTUN memiliki kewenangan menangani sengketa terkait keputusan pejabat negara atau birokrasi.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).

Dia juga menyinggung gugatan terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang sebelumnya pernah diajukan ke PTUN. Menurut Deddy, dalam proses tersebut tidak ada bukti baru yang dihadirkan perwakilan kementerian terkait hingga pemohon akhirnya mencabut gugatan.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa?" ujar Deddy.

Anggota Komisi II DPR itu menilai rencana Gibran membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN sebagai upaya mengulur waktu.

"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Pertemuan keduanya diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Mau Dimakzulkan, Luhut: Mau Dibawa Kemana Negeri Ini Gontok-gontokan Terus

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.23 WIB



BANDA ACEH -- Wacana Hak Menyatakan Pendapat di Senayan menjadi perhatian karena menyasar dugaan ijazah bermasalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu respons akan hal tersebut datang dari Luhut Binsar Pandjaitan.Luhut pasang badan dan mengingatkan adanya paradoks konstitusional, mengingat kemenangan politikus muda itu pada pilpres lalu adalah satu kesatuan paket dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia membedah kompleksitas eskalasi Politik di Senayan. Gibran menurutnya telah melalui tahapan verifikasi yang panjang dan sah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itu, upaya pelengseran secara paksa di tengah jalan diyakini hanya akan memicu krisis legitimasi yang lebih luas.

“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo’. Jadi gimana statusnya,” tegas Luhut dikutip Selasa (10/11/2026).

Terkait polemik ijazah yang dijadikan peluru utama oleh para anggota dewan, ia secara meyakinkan membantah tudingan miring tersebut. Gibran menurutnya mengantongi ijazah setingkat sekolah menengah atas yang sah dan diakui.

Luhut, sebagai perbandingan nyata, mencontohkan keponakannya yang bernama Sansa. Ia mengklaim keponakannya menempuh model pendidikan serupa dengan putra sulung Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB. Dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” urainya.

Luhut sendiri mengimbau seluruh elite dan masyarakat untuk menekan ego sektoral serta menjauhkan diri dari kebencian dan dendam yang tak berkesudahan.

“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” pintanya.

Adapun Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera baru saja mengklaim bahwa usulan hak Menyatakan pendapat telah resmi bergulir. Hal tersebut merupakan pintu masuk konstitusional menuju pemakzulan dari Gibran.

Mardani mengonfirmasi bahwa sudah ada lebih dari 25 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangannya. Meski masih bersifat dukungan personal tanpa instruksi partai, penandatangan tersebut berasal dari lintas fraksi.

NASIONAL

Denny Indrayana: Opsi Jokowi dan Gibran Makin Terbatas, Hanya Punya Dua Opsi

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.41 WIB

BANDA ACEH - Krisis Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perpolitikan tanah air tampaknya telah mencapai titik kritis menyusul polemik terkait ijazah mereka hingga rumor keterkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menilai bahwa ruang gerak serta opsi penyelamatan Politik bagi keluarga tersebut kini sudah sangat menyempit. Bagi Denny, realitas politik saat ini hanya menyisakan dua jalan keluar konstitusional bagi Gibran Rakabuming Raka.

"Opsi pilihan-pilihan bagi keduanya semakin terbatas. Menurut saya, tetap keputusannya hanya ada dua. Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 memberi opsi berhenti atau mundur dan diberhentikan, atau impeachment, dimakzulkan, dipecat dari posisi wakil presiden," kata Denny dikutip Senin (9/11/2026).

Dari kedua pilihan krusial tersebut, pakar hukum ini memandang bahwa pengunduran diri secara sukarela adalah jalan yang paling cepat, mudah, dan rasional untuk diambil guna mencegah destabilisasi negara.

Meskipun tidak ideal dari kacamata penegakan hukum murni, mundur adalah opsi kompromi yang paling lazim terjadi dalam krisis politik tingkat tinggi.

Denny mengingatkan bahwa jika politikus muda itu menolak mundur, proses pemakzulan (impeachment) adalah konsekuensi mutlak, terlepas dari terbukti atau tidaknya keterlibatan ayahnya secara langsung dalam skandal penyadapan. Namun, proses pemakzulan yang panjang di parlemen diyakini akan memicu krisis politik berkepanjangan yang berujung pada lumpuhnya perekonomian bangsa.

Karenanya Gibran memilih mundur dipastikan sedang dipertimbangkan dengan sangat serius oleh para elite politik yang terlibat dalam pengambilan keputusan saat ini demi menyelamatkan stabilitas negara.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jimly: Operasi Listyo Sigit Prabowo Bisa Masuk Unsur Makar, Ancaman Maksimal Hukuman Mati

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.11 WIB

BANDA ACEH - Penyadapan oleh Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ke Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kacamata hukum tata negara. Ia bahkan disebut-sebut terancam hukuman mati.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa kejahatan tingkat tinggi tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berpotensi memenuhi unsur makar.

Prof. Jimly memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk memberantas dan membersihkan para pelaku makar siber di tubuh Polri ini hingga ke akar-akarnya.

Menurutnya, dari kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tindakan spionase ilegal ini sudah pasti mengantongi ancaman pidana minimal 10 tahun penjara. Namun, jika eskalasi niat jahatnya terbukti untuk menggulingkan kekuasaan, ancamannya akan jauh lebih berat.

"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," urai Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Jimly mendesak agar proses peradilan kelak benar-benar membuktikan indikasi makar tersebut tanpa keraguan meski harus menghadapi petinggi dalam kepolisian dari Indonesia.

Adapun Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril Ihza Mahendra Respons Gibran Mau Buktikan Ijazah Asli di PTUN: Gak Ada Gunanya

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.03 WIB



Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada gunanya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebab, perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).

Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran sudah bersifat final.

Menurutnya, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.

"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril menegaskan, Gibran juga tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi. Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Saat ditanya mengenai pernyataan Gibran yang akan membuktikan keabsahan ijazahnya melalui PTUN, Yusril kembali menegaskan langkah tersebut tidak akan berguna karena substansi perkara sudah diputus MA.

"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.

Yusril menambahkan, pembuktian mengenai keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan.

Sementara itu, jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikannya melalui media sosial.

"Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja," katanya.

Sebelumnya, Yusril juga menjelaskan putusan MK dan MA tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.

Selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjabat sebagai Wapres.

"Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden.

Yusril menyebut, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Misteri Motifnya Operasi Listyo Sigit: Apa Betul Mau Membunuh atau Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo?

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.04 WIB

BANDA ACEH - Operasi Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan penyadapan ilegal menyimpan teka-teki besar mengenai motif sesungguhnya sosok tersebut melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak termasuk Presiden Prabowo Subianto.Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie meyakini bahwa operasi intelijen gelap yang menyasar presiden ini bukanlah kejahatan siber biasa, melainkan bagian dari desain besar permainan Politik dan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menolak untuk sekadar melihat kasus ini dari kacamata pelanggaran administratif atau UU ITE. Ia mendesak agar meja hijau kelak tidak hanya mengadili tindakan penyadapannya, tetapi juga menguliti habis niat utama (mens rea) dari komplotan perwira kepolisian dalam memata-matai kepala negaranya sendiri.

"Pasti di forum pengadilan akan terungkap motifnya apa. Apa betul mau membunuh presiden? Mau membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan? Atau misalnya untuk berkhianat pada kepentingan negara?" kata Jimly dikutip Senin (9/11/2026).

Pertanyaan Jimly ini merefleksikan kekhawatiran publik atas betapa berbahayanya penyalahgunaan wewenang aparat keamanan di level tertinggi. Kendati demikian, ia meminta semua pihak untuk tidak mendahului proses peradilan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi mengumumkan tersangka keempat dalam mega-skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah Kadiv TIK Polri (Nonaktif), Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penetapan ini melengkapi daftar komplotan intelijen gelap yang sebelumnya telah menjerat mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Keempatnya telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Hal itu terkait dengan operasi mereka yang tidak memiliki legalitas penegakan hukum sama sekali dalam melakukan penyadapan.

Operasi penyadapan ini secara brutal mengintai ruang privasi kepala negara, jajaran menteri hingga pimpinan redaksi media. Selain itu, guna menutupi kejahatannya, para tersangka bahkan nekat menghapus jejak log penyadapan pada Oktober 2026.

Atas kejahatan berlapis ini, keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 UU KUHP Nasional serta Pasal 32 UU ITE. Hal itu mengancam mereka dengan kurungan maksimal 10 tahun penjara.

NASIONAL

Rocky Gerung Singgung Ketua Partai dalam Isu Dugaan Makar

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 18.55 WIB



Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung. FOTO/Net.

JAKARTA – Isu dugaan makar kembali menjadi sorotan setelah akademisi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, mengungkap adanya kabar mengenai seorang ketua partai politik yang disebut-sebut terlibat dalam pembicaraan berkaitan dengan dugaan upaya makar.

Pernyataan tersebut disampaikan Rocky saat berbincang dengan ekonom Rhenald Kasali melalui kanal YouTube Rhenald Kasali. Percakapan itu ditayangkan pada Senin, 9 November 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Rocky menyebut informasi mengenai keterlibatan seorang pimpinan partai mulai beredar di ruang publik.

Namun, ia tidak mengungkap identitas tokoh politik yang dimaksud maupun memberikan rincian mengenai pembicaraan yang disebut berkaitan dengan dugaan makar.

Rocky mengatakan, informasi itu mulai terungkap secara bertahap.

Ia menyebut adanya seorang ketua partai yang dikabarkan ikut dalam percakapan yang memiliki kaitan dengan persoalan tersebut.

Menurut Rocky, sosok yang dimaksud memiliki karakter kontroversial serta pengaruh besar dalam mengendalikan jaringan oligarki.

Meski demikian, ia tidak menyampaikan bukti ataupun petunjuk spesifik yang dapat memastikan identitas orang tersebut.

Selain menyinggung dugaan keterlibatan elite politik, Rocky turut menyoroti arah dan tujuan akhir dari rangkaian peristiwa yang berkembang.

Ia menilai publik mulai mempertanyakan siapa pihak yang berada di balik berbagai kejadian tersebut dan kepentingan apa yang hendak dicapai.

Rocky juga memperkirakan situasi politik dapat berkembang menuju konsolidasi di antara pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

Dalam kondisi demikian, ia mengingatkan adanya kemungkinan risiko terhadap saksi maupun tokoh yang memiliki informasi penting.

Ia menggambarkan situasi tersebut menggunakan istilah anything goes, yang merujuk pada keadaan ketika berbagai kemungkinan dapat terjadi di tengah ketidakpastian politik.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky turut memberikan penilaian terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia memandang Prabowo sebagai sosok yang memiliki kemampuan membaca situasi politik secara strategis.

Rocky menduga Presiden telah mengamati potensi gejolak sejak lama dan menunggu momentum yang tepat untuk mengambil langkah.

Ia kemudian menghubungkan dugaan tersebut dengan sejumlah perubahan posisi pejabat pemerintahan, termasuk jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Meski demikian, seluruh pandangan mengenai dugaan keterlibatan ketua partai, arah konsolidasi politik, dan strategi Presiden tersebut merupakan pernyataan serta analisis Rocky dalam perbincangan.

Belum ada keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut untuk membuktikan dugaan keterlibatan tokoh partai tertentu.

Identitas ketua partai yang dimaksud pun masih menjadi tanda tanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Sambut Prabowo, Aceh Barat Gelar Zikir Bersama

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 21.15 WIB

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan menggelar zikir dan doa bersama untuk menyambut kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada 11 November 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan ulama, santri, mahasiswa, dan masyarakat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, mengatakan Prabowo dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat dalam rangkaian kunjungan ke wilayah Barat Selatan Aceh, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan.

"Persiapan terus kita matangkan. Sejumlah pihak dari pemerintah pusat juga sudah tiba di Aceh untuk mempersiapkan kedatangan Presiden," kata …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Prof. Jimly: Syarat Pemakzulan Gibran Sudah Terpenuhi

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.52 WIB



BANDA ACEH — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa secara konstitusional syarat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi. Pernyataan itu relevan dengan sikap Anggota DPR Fraksi NasDem Irma Suryani yang menilai pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bersifat rasional dan berlandaskan konstitusi.Irma Suryani, Selasa (10/11/2026), mengatakan pernyataan Surya Paloh tidak boleh dimaknai sebagai dukungan atau penolakan Politik. Menurutnya, Paloh hanya menekankan bahwa jika syarat konstitusional sudah cukup, proses boleh dijalankan. “Ketua umum saya, Bapak Surya Paloh, memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?” ujar Irma kepada wartawan.

Jimly Asshiddiqie sebelumnya telah menyatakan pandangan serupa. Ia menilai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak sah secara hukum, menjadi bukti baru (novum) bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

“Esensinya putusan Mahkamah Agung itu membuktikan bahwa sebenarnya cawapres Gibran temporer itu tidak memenuhi syarat,” kata Jimly dalam program ROSI di KompasTV. “Jadi (Gibran) ini bisa dimakzulkan dengan alasan ternyata dia tidak memenuhi syarat lagi.”

Jimly menjelaskan, alasan “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A UUD 1945 lebih luas daripada sekadar ketidakmampuan karena sakit. Persyaratan administratif pendidikan termasuk di dalamnya. Ia juga menyinggung polemik akun Fufufafa sebagai potensi perbuatan tercela jika terbukti milik Gibran dan pernah disangkal.

Wacana pemakzulan menguat setelah MA mengabulkan kasasi perkara tata usaha negara yang diajukan Subhan Palal pada 30 Oktober 2026. Putusan itu membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sebelumnya, MK dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Meski menilai syarat konstitusional terpenuhi, Jimly berulang kali mengingatkan bahwa realisasi politik pemakzulan tidak mudah. Proses membutuhkan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota, kemudian pemeriksaan di MK, hingga keputusan MPR. Sikap Presiden Prabowo Subianto dan konfigurasi koalisi di parlemen menjadi faktor penentu.

Surya Paloh sendiri menyatakan, jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain, proses boleh dijalankan, meski ia menyebut situasi tersebut …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

PSI Rontok Ditinggal Tiga Tokoh Penting dari Partai, Ini Tanggapan Kaesang

Oleh Redaksi · 9 Nov, 21.41 WIB

BANDA ACEH - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menerima pengunduran diri tiga tokoh pentingnya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Keputusan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep pada Senin (9/11/2026) malam.

Kaesang mengatakan, surat pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh jajaran DPP PSI.

Pihaknya menghormati keputusan tersebut dan tidak mempermasalahkan pilihan para kadernya untuk meninggalkan partai.

“DPP PSI sudah menerima surat pengunduran diri saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Kaesang dalam siaran pers, Senin (9/11/2026) malam.

Kaesang menyebut, PSI memiliki pandangan bahwa kepentingan pengabdian kepada bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun partai Politik.

Menurutnya, keputusan ketiganya untuk mundur merupakan hal yang dihormati oleh organisasi.

PSI pun menyatakan menerima pengunduran diri tersebut.

Adapun posisi yang ditinggalkan ketiganya di lingkungan DPP PSI yakni Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum, serta Giring Ganesha dari jajaran pengurus pusat partai.

Pengunduran diri tiga nama tersebut menjadi perhatian karena mereka selama ini memiliki peran penting dalam perjalanan PSI.

Bahkan, ketiganya juga dikenal sebagai figur yang kini mengemban tanggung jawab di pemerintahan.

Raja Juli Antoni saat ini menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Ia sebelumnya menyampaikan keputusan mundur dari jabatan Sekjen PSI dan seluruh aktivitas kepartaian karena ingin lebih berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan.

Sementara itu, Giring Ganesha yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan juga telah mengumumkan keputusannya meninggalkan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka saat ini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Giring menyampaikan pengunduran dirinya di akun Instagram pribadinya dan mengenang awal keterlibatannya di dunia politik.

Menurutnya, ketika pertama kali terjun ke dunia politik, ia memiliki cita-cita sederhana, yakni menjadi pelayan publik yang mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia.

“Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga,” ungkap Giring dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya hari Senin (9/11/2026).

Ia juga menceritakan pengalamannya ketika mendapat tawaran dari Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam pemerintahan pada September 2024.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mundur atau Dimakzulkan, Gibran Tetap Berhak Dapat Pensiun?

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.09 WIB



BANDA ACEH -Wacana pengunduran diri hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan dan fasilitas negara yang akan diterimanya setelah tidak lagi menjabat.

Diketahui, mantan Wakil Presiden tidak hanya berhak mendapatkan uang pensiun, tetapi juga sejumlah fasilitas negara, mulai dari rumah kediaman, kendaraan, biaya rumah tangga hingga pelayanan kesehatan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, secara konstitusional terdapat dua pilihan untuk mengakhiri jabatan Gibran, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.

Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Hak tersebut tidak membutuhkan alasan khusus maupun persetujuan atas dasar pertimbangan tertentu.

"Ada pilihan dimundurkan atau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu Pasal 8, itu hak subjektif. Mengundurkan diri tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan alasan apa-apa. Itu hak subjektif," kata Refly lewat siaran live Youtube miliknya, Selasa, 10 November 2026.

Terkait kemungkinan Gibran tetap memperoleh pensiun dan fasilitas negara apabila mengundurkan diri, Refly menilai persoalan tersebut bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.

Ia memahami adanya anggapan bahwa mengundurkan diri membuat seorang pejabat tetap bisa menikmati fasilitas protokoler dan sejumlah hak setelah meninggalkan jabatan.

Namun, menurutnya, fasilitas yang diterima mantan Wakil Presiden masih bisa dikaji ulang apabila memang diperlukan.

"Banyak orang mengatakan, wah enak sekali mengundurkan diri kemudian protokoler dan sebagainya tetap didapatkan. Saya kira bukan big deal ya. Itu biasa saja. Kalau mau direview nanti fasilitas yang diperoleh nanti bisa saja," ujarnya.

Refly justru berpandangan bahwa pengunduran diri lebih baik dibandingkan pemberhentian melalui proses pemakzulan yang berpotensi memicu kegaduhan Politik.

Menurutnya, proses pemakzulan dapat menimbulkan gonjang-ganjing politik berkepanjangan dan berisiko mengganggu stabilitas nasional.

"Tapi sekali lagi pengunduran diri itu lebih baik dibandingkan dimundurkan. Apalagi gonjang-ganjingnya luar biasa yang bisa menimbulkan instabilitas politik," pungkasnya.

Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden mengatur hak pensiun bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Dalam Pasal 6, pensiun diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak administratif, termasuk tunjangan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudinya, serta fasilitas kesehatan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Para Ketua Umum Partai Sudah Berbincang dengan Prabowo soal Rencana Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.08 WIB

BANDA ACEH – Sejumlah ketua umum partai Politik telah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Informasi ini muncul di tengah menguatnya dinamika politik di DPR usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.Menurut laporan Tempo.co yang dirilis sekitar 8–9 November 2026, gagasan pemakzulan semakin mengerucut. DPR dikabarkan merancang dokumen hak menyatakan pendapat untuk merespons ide pelengseran Gibran. Sementara itu, Prabowo disebut sedang menimbang relasinya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran.

Wacana pemakzulan menguat setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Golkar Somasi Sri Radjasa dan Said Didu, Beri 3×24 Jam Cabut Pernyataan & Minta Maaf ke Bahlil

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.56 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak main-main dengan ancamannya terkait isu yang menyudutkan dirinya dalam pusaran kasus penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit dkk.Partai Golkar melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) resmi melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.

Keduanya diberi waktu 3 x 24 jam untuk mencabut pernyataan terkait Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam isu penyadapan.

"Somasi terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan untuk mencabut pernyataan," kata Juru Bicara Tim Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).

Muhammad Said Didu adalah mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005–2010, dan Staf Khusus Menteri ESDM pada 2014–2016. Belakangan Said Didu kerap memberikan kritik terhadap pemerintah.

Sementara Sri Radjasa Chandra adalah seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat yang banyak berkarier di bidang intelijen dengan pangkat terakhir Kolonel. Saat ini dia dikenal juga sebagai pengamat militer dan intelijen.

Selain mencabut pernyataannya, Said Didu dan Sri Radjasa diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada Bahlil Lahadalia.

Derek menjelaskan, somasi tersebut berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar dan dinilai mengarah kepada Bahlil.

Di antaranya, narasi yang menyebut Ketua Umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan presiden, ikut bertemu dengan para jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut tiga jam sebelum penangkapan, serta melakukan kriminalisasi untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Hal tersebut dinilai menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, serta disebut menyerang kehormatan Bahlil secara langsung.

"Di mana pernyataan-pernyataan tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti apa pun," katanya.

Ia menyebutkan, konten yang dipersoalkan diunggah melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul "Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril".

Selain meminta pencabutan pernyataan dan permohonan maaf, Golkar juga meminta pihak-pihak yang menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan takedown serta tidak kembali menyebarkannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Golkar Respons Gibran Mau Mundur dari Wapres: Harusnya Disampaikan Terbuka ke Publik

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.20 WIB



Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia merespons keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mundur dari jabatannya. Dia mengatakan niat itu seharusnya disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang sebagai bentuk keputusan pengunduran diri," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski Gibran telah menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, Doli menegaskan presiden tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau pun menolak pengunduran diri seorang wapres.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan, apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur, DPR menjadi salah satu institusi yang akan menyikapi dan menilai pengunduran diri tersebut.

"Nah justru kalau ya, kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi ya tentang pengunduran diri," pungkasnya.

Diketahui, Gibran bertemu Prabowo untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya dari wapres. Pertemuan keduanya diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada, Selasa (10/11/2026) pagi.

Prasetyo mengatakan, salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah dinamika terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazahnya.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi bapak wakil presiden ada pertemuan dengan bapak presiden pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” tuturnya

NASIONAL

Wacana Pemakzulan Gibran Disorot Media Asing, 4 Parpol Mulai Bersikap

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.31 WIB

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat perhatian di parlemen. Empat partai Politik disebut tengah mempertimbangkan penyelidikan terhadap pemenuhan syarat Gibran sebagai wakil presiden.

Kabar ini diungkap kantor berita Reuters dalam laporan 5 November 2026. Menariknya, tiga dari empat partai yang disebut sedang mempertimbangkan langkah tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan komunikasi antarpartai di DPR semakin intensif untuk menggunakan hak konstitusional parlemen. Sementara itu, perwakilan PKS Muhammad Kholid menyebut partainya masih mengkaji sejumlah opsi dan menjalin komunikasi dengan partai lain.

Namun, belum ada kesepakatan resmi untuk mengajukan pemakzulan. Reuters juga tidak menyebut secara lengkap tiga partai lain yang dimaksud.

Polemik ini berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek gugatan di MK dan MA.

Dalam putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, permohonan tersebut tidak diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara perselisihan hasil pemilu.

Tak berselang lama, MA mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar surat tersebut ditarik untuk dimusnahkan.

Dua putusan itu kini menjadi rujukan dalam desakan agar persoalan syarat pendidikan Gibran ditindaklanjuti melalui jalur politik.

DPR memiliki mekanisme untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan presiden atau wakil presiden. Berdasarkan Pasal 210 UU MD3, usulan itu dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dengan disertai bukti yang sah.

Jika disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR akan dibawa ke MK untuk diuji. Apabila MK membenarkan pendapat tersebut, proses dapat berlanjut ke MPR untuk memutuskan pemberhentian.

Peta kekuatan partai di DPR membuat perkembangan ini semakin menarik. Reuters mencatat koalisi Prabowo menguasai sekitar 81% kursi parlemen. PDIP menjadi satu-satunya partai di luar koalisi, sementara tujuh partai lainnya mendukung pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Giring Ungkap Alasan Mundur dari PSI: Sudah Tak Sejalan

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.17 WIB

BANDA ACEH - Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang karena ia merasa sudah tidak sejalan dengan hal-hal yang diperjuangkan partai.Ia mengatakan, keputusan itu telah diambil sejak pekan lalu dan kini secara resmi berpamitan dari partai berlambang gajah tersebut.

“Namun, dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” kata Giring dalam keterangannya pada Senin (9/11).

“Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia,” lanjutnya.

Giring mengungkapkan, awal mula dirinya terjun ke dunia Politik dilandasi cita-cita sederhana, yakni menjadi pelayan publik yang dapat membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Selama berpolitik, ia mengaku mendapatkan banyak pengalaman, persahabatan, hingga pelajaran hidup.

“Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana (yaitu) menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta,” ujarnya.

Ia juga mengenang momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghubunginya pada September 2024. Saat itu, Prabowo mengajak Giring untuk bergabung dan berjuang bersama dalam pemerintahan yang akan dipimpinnya.

“Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelpon dan mengajak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Rumah Dinas Wapres di Menteng Terpantau Sepi

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.27 WIB



BANDA ACEH - Rumah dinas (rumdin) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, terpantau sepi, Selasa (10/11/2026) sore. Kondisi ini terlihat setelah Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 16.30 WIB, arus lalu lintas di sekitar Taman Suropati, tepat di depan rumdin Wapres, terpantau ramai lancar.

Selain itu, kendaraan taktis milik aparat keamanan yang biasanya terparkir di sekitar rumdin tidak terlihat hingga berita ini ditulis. Penjagaan di bagian luar kediaman juga tampak lengang.

Aktivitas masyarakat di sekitar rumdin Wapres pun relatif normal. Warga masih terlihat menjalankan kegiatan seperti biasa.

Diketahui, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya di tengah polemik ijazahnya, menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Hal itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan MK dan MA mengenai polemik ijazahnya.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” katanya.

Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” katanya

NASIONAL

Dipecat Polri gegara Kasus Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Melawan Lewat Banding

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.53 WIB



BANDA ACEH - Irjen Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Polri menyatakan Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa (10/11/2026).

Isir menjelaskan, permohonan banding tersebut akan diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Nantinya, komisi di tingkat banding akan memeriksa kembali putusan terhadap Ahrie.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis KKEP Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta terkait perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah pejabat Polri.

Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah elite partai Politik, aktivis, hingga media juga disebut menjadi target penyadapan dalam perkara tersebut

ACEH

Syech Muharram Minta Keuchik Selaraskan Visi Daerah Dalam Membangun Gampong

Oleh Redaksi · 9 Nov, 22.30 WIB

ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syech Muharram meminta Keuchik (kepala desa-red) agar membangun gampong searah dengan visi Pemerintah Daerah.

“Salah satu tujuan retret ini adalah untuk menyelaraskan pembangunan gampong, searah dengan visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar,” ujar Syech Muharram, pada saat membuka secara resmi reatret 234 Keuchik di Gedung SKB Kota Jantho, Senin (9/11/2026).

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dibawah pimpinan Bupati Muharram Idris bersama Wakil Bupati Syukri yaitu “Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera, Bersyariah dalam Bingkai Ahlulsunnah Wal Jamaah”.

Pada kesempatan yang sama Bupati mengatakan gampong merupakan fondasi pembangunan daerah.

“Keuchik bukan sekadar pemegang jabatan, melainkan pemimpin masyarakat, pengayom warga, penggerak pembangunan, dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat,” tegasnya.

Salah seorang Keuchik Peserta retreat Dedy Novreza mengaku pembangunan gampong seharusnya mengikuti arah kebijakan daerah, maka pelaksanaan retret 234 keuchik se-Kabupaten Aceh Besar diharapkan menjadi penyatuan visi pembangunan Aceh Besar dari gampong.

“Pembangunan gampong seyogyanya mendukung visi Bupati Aceh Besar dalam membangun daerah, untuk itu retret ini harus mengarah kesana,” ujar Dedy Novreza, Keuchik Lam Trieng Kecamatan Kuta Baro.

Selain itu, retret juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi para pemimpin gampong untuk memperkuat kemampuan manajerial sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Semoga ini menjadi pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” harap Dedy.

Kepemimpinan gampong, katanya membutuhkan kemampuan mengelola pemerintahan sekaligus membangun komunikasi dan kepercayaan masyarakat. Keuchik juga dituntut mampu mengarahkan perangkat gampong agar pelayanan dan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai harapan warga.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui kegiatan seperti retret dinilai penting untuk memperkuat kesiapan para keuchik menghadapi berbagai tantangan pemerintahan di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melaksanakan retret yang diikuti 234 keuchik dari seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan telah dimulai sejak kemaren yang diawali dengan apel penerimaan peserta di halaman Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan Jamuan Makan malam oleh Bupati Aceh Besar di Meuligoe di Kota Jantho semalam.

Melalui kegiatan tersebut, para keuchik diharapkan memperoleh tambahan wawasan, memperkuat karakter kepemimpinan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan gampong.[]

NASIONAL

Jika Gibran Dimakzulkan, Jokowinisti Tegaskan Kaesang Harus Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.38 WIB



Gambar ini menampilkan seorang pria muda bernama Kaesang Pangarep anaknya Joko

BANDA ACEH - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai dapat memunculkan dinamika Politik baru di lingkaran kekuasaan.

Ketua Jokowinisti, Nurhadianto Sukojoyo, menegaskan bahwa jika Gibran dimakzulkan, posisi wakil presiden selanjutnya harus diberikan kepada Kaesang Pangarep.

Nurhadianto menilai Kaesang memiliki kapasitas dan kedekatan politik maupun ideologis dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Kaesang merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan garis politik dan pemikiran Jokowi dalam pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pj Sekda Aceh Ikuti Rakor Pelibatan Pihak Ketiga dalam Pembersihan Sedimentasi Sungai

Oleh Redaksi · 9 Nov, 20.55 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai bersama sejumlah kementerian dan instansi terkait melalui sambungan Zoom, di ruang rapat Sekda Aceh, Senin (9/11/2026).

Turut mendampingi, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait. Sementara itu, para peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.

Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga bertugas sebagai Kepala Posko Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.

Dalam penjelasannya, Safrizal menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut dilaksanakan menyikapi terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Diduga Pelindung Tambang Ilegal Arif Kurniawan, DPR Desak Kejagung Sikat Habis!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.13 WIB



BANDA ACEH – Dugaan adanya pihak kuat yang melindungi aktivitas pertambangan nikel bermasalah milik pengusaha Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai menjadi sorotan serius.

Nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ikut disebut dalam dugaan jejaring perlindungan tersebut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) pun didesak membongkar seluruh pihak yang diduga berada di belakang bisnis tambang itu.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, secara tegas meminta Kejagung tidak hanya membongkar aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum, tetapi juga menelusuri siapa saja pihak yang memungkinkan praktik tersebut terus berjalan selama bertahun-tahun.

Desakan itu mencakup dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut menjadi beking atau pelindung aktivitas pertambangan Arif Kurniawan sepanjang periode 2013–2025, termasuk nama Listyo Sigit yang kini menjadi sorotan.

"Kami selalu mendorong aparat menindak tegas seluruh aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan (beking)," kata Rudianto di Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku operasional di lapangan. Pihak yang diduga memberikan perlindungan, memfasilitasi, atau membiarkan aktivitas ilegal berlangsung juga harus diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan.

"Praktik pertambangan ilegal berpotensi mengurangi penerimaan negara sekaligus merugikan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak tanpa pandang bulu," ujarnya.

Sorotan terhadap Arif bukan tanpa alasan. Pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, tersebut disebut memiliki jejaring bisnis perdagangan nikel mentah dalam skala besar. Bersama mitra bisnisnya, Edi Liu Amas, Arif dikaitkan dengan sedikitnya 20 konsesi pertambangan dengan total luas sekitar 71.000 hektare.

Besarnya jejaring bisnis tersebut membuat dugaan praktik pertambangan ilegal dan kemungkinan adanya perlindungan dari pihak-pihak berpengaruh menjadi persoalan yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Bloomberg sebelumnya memperkirakan nilai perdagangan bijih nikel yang ditangani Arif mencapai sekitar US$3 miliar per tahun atau setara Rp52,5 triliun, berdasarkan asumsi produksi dan harga yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Angka ini menggambarkan besarnya nilai ekonomi yang dipertaruhkan dalam bisnis perdagangan nikel tersebut.

Dengan nilai bisnis sebesar itu, penyidik perlu menelusuri aliran uang, hubungan bisnis, serta kemungkinan adanya dukungan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Namun, dugaan keterlibatan Listyo Sigit maupun nama lainnya harus dibuktikan melalui proses penyidikan, bukan sekadar berdasarkan kemunculan nama.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Golkar Somasi Said Didu-Sri Radjasa

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.05 WIB



BANDA ACEH -Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar resmi mengeluarkan somasi terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra pada Selasa, 10 November 2026.

Somasi dilayangkan terkait dugaan tuduhan yang ditujukan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto, dan menyebarkan tuduhan palsu tersebut ke media sosial.

Somasi Partai Golkar itu tertuang dalam Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.

"Hari ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Tim Hukum DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat.

Sattu menjelaskan bahwa somasi terbuka itu juga atas izin dan kuasa yang diberikan langsung oleh Bahlil.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Hukum Partai Golkar, Derek Loupatty menjelaskan bahwa Golkar menyoroti persoalan ini dari jauh hari.

"Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," jelasnya.

Derek pun menegaskan seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta ataupun bukti pendukung.

Sebaliknya, Derek menilai hal ini mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, serta bisa memicu ketidakstabilan Politik nasional.

"Pernyataan Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.

Dari somasi ini, Derek memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk meminta maaf secara terbuka.

"Dalam kurun waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tegasnya.

ACEH

BPOM Aceh Perkuat Sinergi KKS melalui Inovasi Sanger Ureueng Aceh

Oleh Redaksi · 9 Nov, 19.21 WIB

BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh turut berpartisipasi dalam Rapat Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Sekretariat Daerah Aceh, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra, Sekretariat Daerah Aceh ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kelembagaan dan sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Aceh.

Rapat dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, perwakilan instansi vertikal, serta Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait. BBPOM di Banda Aceh diwakili Suryani Fauzi selaku Kepala Tim Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BBPOM di Banda Aceh.

Dalam pembahasan, Ferdiyus menegaskan bahwa penyelenggaraan KKS bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

“Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat membutuhkan komitmen dan kerja sama semua sektor. Setiap instansi perlu berperan sesuai tugas dan kewenangannya agar program dapat berjalan terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ferdiyus.

Ia berharap Tim Pembina KKS Provinsi Aceh dapat memperkuat koordinasi sekaligus melaksanakan pembinaan, pendampingan, konsultasi teknis, monitoring, dan evaluasi terhadap kabupaten/kota. Upaya tersebut perlu didukung pembagian tugas yang jelas serta rencana kerja dengan target terukur.

Penyelenggaraan KKS mencakup sembilan tatanan, mulai dari kehidupan masyarakat sehat mandiri, permukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar, perkantoran dan perindustrian, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas jalan, perlindungan sosial, hingga penanggulangan bencana. Seluruhnya membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dalam aspek keamanan obat dan makanan.

Sebagai bentuk kontribusi, BBPOM di Banda Aceh memperkenalkan inovasi “Sanger Ureueng Aceh (Sharing Informasi Aneuk Nanggroe dan Edukasi Registrasi)”. Inovasi ini memanfaatkan budaya ngopi dan keberadaan warung kopi (warkop) di Aceh sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Ketua Tim Publikasi dan KIE BBPOM Aceh, Suryani Fauzi menjelaskan bahwa warung kopi memiliki potensi sebagai …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Nagan Raya Bidik Rekor MURI Lewat Bentangan Merah Putih 24 Km

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 17.27 WIB

NAGAN RAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya, Aceh, bersiap menggelar aksi pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer pada 11 November mendatang. Kegiatan yang melibatkan ribuan masyarakat tersebut ditargetkan dapat mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Nagan Raya, Arafiq A. Karim, S.Sos., MPA, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme.

“Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer ini bukan sekadar kain. Ini merupakan simbol bahwa Nagan Raya dan Aceh cinta Indonesia. Kami ingin menunjukkan bahwa semangat nasionalisme dari ujung barat Aceh tidak pernah padam,” ujar Arafiq, Senin (9/11/26).

Ia menjelaskan, bentangan bendera tersebut direncanakan dimulai dari Bandara Cut Nyak Dhien hingga Masjid Agung Baitul A'la (Giok), dengan melintasi sejumlah wilayah di Kecamatan Kuala Pesisir, Kuala, dan Suka Makmue.

Kegiatan ini juga direncanakan menjadi bagian dari penyambutan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Arafiq, pelaksanaan kegiatan membutuhkan ribuan relawan yang terdiri atas masyarakat, pelajar, dan santri. Mereka akan berdiri berjajar memegang bendera secara estafet di sepanjang rute yang telah ditentukan, dengan dukungan pengamanan TNI dan Polri.

Pemkab Nagan Raya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang tua, petani dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut ambil bagian. Ini merupakan kegiatan milik kita bersama,” tutupnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

NASIONAL

Mayoritas Fraksi Disebut Dukung HMP untuk Pemakzulan Gibran, DPR Bakal Proses

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.17 WIB



BANDA ACEH - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan mengaku telah menerima usulan tersebut dan akan membahas mekanismenya setelah pembukaan masa sidang DPR.

Puan mengatakan DPR tidak bisa langsung memproses usulan HMP tanpa mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ujar Puan seusai menghadiri rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Ia meminta seluruh anggota DPR menyikapi polemik tersebut secara tenang. Puan juga mengingatkan agar pembahasan yang belum memiliki keputusan resmi tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.

"Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.

Sementara itu, dukungan terhadap penggunaan HMP disebut telah meluas di kalangan anggota DPR lintas fraksi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan mayoritas fraksi disebut telah menandatangani usulan tersebut.

"Sepengetahuan saya mayoritas fraksi, tapi nanti tanya ke fraksi masing-masing," kata Mardani kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (10/11/2026).

Mardani mengklaim terdapat dokumentasi berupa tanda tangan anggota fraksi yang mendukung penggunaan HMP. Ia meminta publik menunggu penyampaian sikap resmi DPR melalui forum yang akan ditentukan.

"Kita akan menyampaikan, apakah nanti di forum ataupun tertutup, tetap akan disampaikan," ucapnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, sebelumnya juga menyebut komunikasi antarpartai telah mengerucut pada penggunaan HMP. Namun, pembahasan tersebut masih berlangsung secara informal.

"Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada Hak Menyatakan Pendapat," ungkap Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR.

Dukungan terhadap usulan tersebut juga datang dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menerima aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat agar ikut mengajukan HMP di DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai sebagai pilihan paling rasional untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.

Wacana penggunaan HMP ini berkaitan dengan polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran yang kembali mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengunduran Diri Gibran Bikin Anggaran Negara Boncos

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.50 WIB



BANDA ACEH -Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu sorotan tajam terhadap potensi beban anggaran negara, khususnya terkait hak pensiun dan fasilitas melekat bagi mantan pejabat tinggi.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad menyoroti perbedaan konsekuensi hukum dan finansial antara pejabat yang mundur secara sukarela dengan yang diberhentikan melalui mekanisme hukum.

"Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Negara boros lagi kan. Dia jadi mantan Wakil Presiden," kata Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Suparji menjelaskan, skenario pemberhentian tidak dengan hormat memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap hak-hak keuangan pascajabatan, termasuk pencabutan hak pensiun.

Meski demikian, seluruh konsekuensi tersebut tetap wajib mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dasar hukum pemberhentian yang sah.

Dalam ranah ketatanegaraan, pemberhentian presiden maupun wakil presiden tidak dapat ditempuh sekadar berdasarkan pertimbangan politis. Mekanisme tersebut diatur ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang melibatkan peran DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR.

Oleh karena itu, Suparji menekankan pentingnya kejelasan status jabatan Gibran guna meredam potensi ketidakpastian politik dan ketatanegaraan yang berkepanjangan.

Selama wacana pengunduran diri tersebut masih sebatas niat, belum ada implikasi hukum apa pun terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Paling murah dalam konteks tata negara itu ya dimundurkan (dipecat). Kalau mundur nanti kan dapat rumah, dapat tunjangan dan lain sebagainya," pungkasnya.

NASIONAL

Tertunduk Lesu, Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Secara Tidak Hormat

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.46 WIB



BANDA ACEH -Jenderal Polisi bintang dua, Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan ini dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.

Irjen Ahrie dipecat usai jadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

"Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 10 November

Sambil tertunduk lesu, Irjen Ahrie mendengarkan putusan dewan etik yang menyatakan dirinya melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Majelis KKEP menilai Irjen Ahrie melakukan perbuatan tercela. Atas putusan ini, Irjen Ahrie mengajukan banding.

Mantan Kadivkum Polri ini sebelumnya ditetapkan tersangka bersama dengan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irje Eko Hadi Santoso. Ketiganya tersandung kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto

ACEH

Said Fadheil Targetkan Pendidikan Aceh Barat Terbaik pada 2028

Oleh Aceh Barat · 9 Nov, 17.04 WIB

MEULABOH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menargetkan daerah itu menjadi salah satu daerah dengan kualitas pendidikan terbaik di Provinsi Aceh pada 2028. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi pemerintah, guru, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, SH, saat menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kecamatan Johan Pahlawan dan Meureubo di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat, Senin (9/11/2026).

Said mengatakan, pencapaian target tersebut harus didukung pembenahan manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Pemerintah juga berkomitmen memastikan pemerataan akses dan layanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedalaman, pesisir, maupun perkotaan.

Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus diiringi pembentukan karakter generasi muda yang disiplin, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

Ia meminta seluruh sekolah menjalankan instruksi bupati terkait pembiasaan membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai serta pelaksanaan salat berjamaah di lingkungan sekolah.

“Guru harus menjadi teladan bagi siswa, baik dalam kedisiplinan, sikap maupun perilaku sehari-hari. Sekolah juga harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan mengembangkan potensi,” ujarnya.

Said turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi tenaga pendidik, mulai dari peningkatan kompetensi hingga persoalan kesejahteraan. Karena itu, ia berharap PGRI dapat menjadi jembatan komunikasi antara guru dan pemerintah daerah dalam menyampaikan aspirasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan.

Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PGRI memperkuat kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan inovasi dalam proses pembelajaran.

“Jadikan PGRI sebagai mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan pendidikan Aceh Barat yang lebih baik,” pungkasnya.[]

Editor : Biro Meulaboh.

EDUKASI

Mahasiswa Magister FKIP USK Motivasi Santri Dayah Wakaf Barbate, Dorong Gantung Cita-Cita Setinggi Langit

Oleh Hamdani · 9 Nov, 19.08 WIB

ACEH BESAR — Sebanyak 22 mahasiswa Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK) mengunjungi Dayah Wakaf Barbate yang berlokasi di kawasan Kebun Kurma, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (8/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus berbagi pengalaman dan motivasi kepada para santri, khususnya dalam membangun semangat belajar, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, serta menumbuhkan keberanian untuk meraih cita-cita setinggi mungkin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting: Kelakuan Listyo Cs Tak Beda dengan PKI, Diduga Terkait Jaringan Narkoba dan Judi

Oleh Redaksi · 10 Nov, 13.58 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak dari lingkungan kepolisian. Ia menilai persoalan tersebut bukan tindak pidana biasa, melainkan berpotensi menyentuh ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.Pernyataan itu disampaikan Selamat Ginting dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (10/11/2026).

Selamat mempertanyakan penanganan kasus tersebut, terutama terkait jumlah tersangka yang telah ditetapkan. Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap kepala negara selama sekitar satu pekan seharusnya mendapat perhatian serius karena menyangkut keamanan Presiden sekaligus kedaulatan negara.

"Ini negara apa? Katanya negara demokrasi, ada penyadapan sudah satu pekan terus, kok cuma empat tersangka. Ini bukan pidana biasa, melainkan potensi ancaman terhadap pertahanan keamanan negara," kata Selamat.

Ia bahkan menggunakan perbandingan historis dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggambarkan keseriusan persoalan yang dipersoalkan tersebut.

Selamat juga melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik kasus tersebut. Ia menyebut sejumlah kemungkinan, mulai dari kepentingan asing hingga jaringan narkoba dan perjudian.

"Listyo Sigit dan kawan-kawan ini diduga mereka bagian dari jaringan yang mungkin terkait dengan kepentingan asing, jaringan narkoba atau jaringan judi," ujarnya.

Lebih jauh, Selamat meminta agar para tersangka ditempatkan dalam pengamanan tahanan dengan tingkat pengawasan sangat ketat. Ia secara khusus menyebut fasilitas tahanan di Guntur.

Menurutnya, penanganan perkara yang menyangkut dugaan ancaman terhadap kepala negara tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang sama seperti tindak pidana umum.

Selamat juga secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Hei, Presiden Prabowo, ambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini," tegasnya.

Pernyataan Selamat tersebut kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Publik membutuhkan penjelasan mengenai konstruksi perkara, alat bukti, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan lain di balik dugaan tindakan tersebut.

Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut maupun menjadi tersangka tetap harus memperoleh perlindungan hak hukum dan asas praduga tak bersalah. Pembuktian keterlibatan seseorang harus dilakukan melalui proses hukum yang terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NASIONAL

Gibran Niat Mundur, Anggota DPR Tegaskan Wacana Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Tetap Jalan

Oleh Redaksi · 10 Nov, 19.08 WIB



BANDA ACEH - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan niat pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak akan menghentikan proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan.

Doli mengatakan, proses komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum muncul informasi mengenai niat Gibran mengundurkan diri.

"Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menjelaskan, proses HMP yang berjalan di DPR merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah SMA Gibran. Menurutnya, putusan dua lembaga peradilan tersebut harus segera direspons parlemen.

"DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.

Doli menyebut komunikasi lintas fraksi terus berlangsung. Dia juga membuka kesempatan bagi anggota DPR yang ingin menggunakan HMP sebagai hak konstitusional legislator.

"Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini," tuturnya.

Doli menambahkan, pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. Dia berharap persoalan itu segera diselesaikan agar energi pemerintah dan parlemen dapat difokuskan pada kepentingan masyarakat.

"Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat, lebih cepat lebih bagus," imbuhnya

HIBURAN

Rp14,69 Miliar Dana APBN Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad untuk Jasa Influencer

Oleh Redaksi · 9 Nov, 23.22 WIB

BANDA ACEH – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai total Rp14.696.955.002 (sekitar Rp14,69 miliar) oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Temuan ini dirilis melalui siaran pers pada Senin (9/11/2026) berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 di portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Pengadaan terdiri dari delapan paket. Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024, dengan total sekitar Rp3,9 miliar. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,7 juta), Instagram Reels akun @raffinagita1717 (Rp205,9 juta), Instagram Story (Rp575,7 juta), event attendance (Rp2,52 miliar), dan penayangan TikTok (Rp144,4 juta).

Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026, dengan total sekitar Rp10,8 miliar: influencer engagement oleh Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Rp3,597 miliar), influencer engagement untuk pembangunan BINS oleh Setditjen Perikanan Budidaya (Rp3,6 miliar), serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna oleh Setditjen Perikanan Tangkap (Rp3,6 miliar).

ICW mencatat kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia terhubung erat dengan Raffi Ahmad. Berdasarkan dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham perusahaan tersebut. Raffi Ahmad disebut menguasai mayoritas saham perusahaan induk, memiliki 0,9 persen saham secara langsung, dan menjabat sebagai komisaris.

Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. ICW menyoroti bahwa kontrak KKP dengan perusahaan tersebut terjadi setelah pelantikan, sehingga menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Organisasi antikorupsi itu mengidentifikasi sejumlah persoalan utama. Pertama, inkonsistensi dengan kebijakan efisiensi anggaran. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan membatasi belanja seremonial, publikasi, dan sejenisnya. Namun, belanja jasa influencer tetap berlangsung dalam jumlah besar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (menjadi Rp693 triliun pada 2026) dan tekanan pada dana desa.

Kedua, manfaat pengadaan dinilai belum terukur secara transparan, padahal kedua kementerian telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan kanal komunikasi publik.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Mewaspadai Skenario Pelaku Sebenarnya Skandal Penyadapan Ilegal: "Intellectual Dader"

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.31 WIB

Oleh: Tarmidzi Yusuf((Kolumnis))

ANTAN Kapolri yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian makin disorot dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Secara mengejutkan muncul nama mantan Kapolri lain, Idham Aziz.

Nama Idham Aziz mendadak muncul pasca ketidakhadirannya saat 10 mantan Kapolri bertemu Presiden Prabowo, Ahad 8 November 2026 di Hambalang.

Sengaja atau ada skenario lain? Menutupi nama mantan Kapolri yang selama ini sudah lama beredar di masyarakat terkait penyadapan ilegal? Wallahua'lam Yang jelas ketidakhadiran Idham Aziz memunculkan spekulasi baru.

Adalah Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD pertama kali yang mengungkapkan penangkapan sejumlah Irjen hingga Kombes di rumah mantan Kapolri terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Namun, menurut Mahfud MD, rumah mantan Kapolri yang dimaksud bukan milik Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu rumah mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz? Atau sekadar pengalihan isu untuk menutupi mantan Kapolri yang dimaksud? Entahlah.

Mantan Kapolri Idham Aziz satu-satunya mantan Kapolri yang tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Hambalang kemarin. Ada apa?

Belum ada penjelasan terkait ketidakhadiran mantan Kapolri Idham Aziz. Nama Idham Aziz mengingatkan kita akan peristiwa pembantaian dan pembunuhan 6 Laskar FPI yang kejadiannya saat Idham Aziz menjabat Kapolri.

Spekulasi liar berkembang. Benarkah nama mantan Kapolri Tito Karnavian atau Idham Aziz dikait-kaitkan dengan mantan Kapolri yang diungkap Mahfud MD?

Rumah mantan Kapolri lain selain Listyo Sigit Prabowo tempat penangkapan pada Selasa, 3 November 2026 dinihari, kata Mahfud MD.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pernyataan Irjen Ahrie Sonta Siap Buka-bukaan Soal Dugaan Penyadapan Bisa Jadi Simalakama

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.06 WIB



BANDA ACEH -Pernyataan Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menyatakan siap buka-bukaan terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara dinilai bisa menjadi pedang bermata dua.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan pernyataan tersebut justru berpotensi membuka persoalan politik dan hukum yang lebih luas, bergantung pada materi yang nantinya diungkap.

"Dalam negara hukum, yang harus diuji bukan hanya legalitas tindakan penyadapan, tetapi juga substansi informasi yang menjadi alasan dilakukannya tindakan tersebut," kata Saiful kepada RMOL, Selasa, 10 November 2026.

Menurut Saiful, apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, apabila terdapat indikasi kuat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang menjadi latar belakang penyadapan, substansi informasi tersebut juga perlu diperiksa.

Ia mengingatkan, dugaan adanya pelanggaran hukum tidak serta-merta membenarkan tindakan penyadapan yang dilakukan secara ilegal.

Saiful juga meminta agar pengungkapan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak selektif. Sebab, informasi yang disampaikan hanya sebagian berpotensi menimbulkan persepsi yang menguntungkan salah satu pihak.

"Jangan sampai yang dibuka hanya bagian yang menguntungkan satu pihak, sementara informasi yang berpotensi menjelaskan persoalan secara utuh justru disembunyikan. Publik membutuhkan pengungkapan yang komprehensif, bukan pengungkapan yang parsial atau selektif," ujarnya.

Saiful menambahkan, pengungkapan kasus penyadapan tidak boleh berubah menjadi alat tawar-menawar politik. Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah kebenaran secara utuh serta pertanggungjawaban hukum yang adil.

"Jangan sampai pengungkapan ini justru menjadi alat tawar-menawar politik, karena yang dibutuhkan publik bukan saling membuka aib atau saling mengancam, melainkan kebenaran yang utuh dan pertanggungjawaban hukum yang adil," tegasnya.

Ia menilai, apabila materi yang diungkap menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum serius, pihak yang menjadi sasaran penyadapan juga harus siap menghadapi konsekuensi sesuai ketentuan hukum.

"Jadi, buka-bukaan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Pihak yang melakukan penyadapan bisa dipersoalkan apabila tidak memiliki dasar hukum yang sah, tetapi pihak yang menjadi sasaran juga bisa menghadapi konsekuensi apabila materi yang terungkap menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang serius," pungkas Saiful.

NASIONAL

Sidang Etik, Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Buntut Kasus Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 20.41 WIB



BANDA ACEH - Polri telah selesai menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Hasilnya, sidang menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Ahrie Sonta dari kedinasan Polri.Putusan itu disampaikan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Johnny.

Sebagai informasi, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Ahrie, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Selain pada Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh Politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.

Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026.

Penyadapan dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah, dan para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

ACEH

Perempuan TPG di Banda Aceh Diminta Lebih Aktif Tangani KDRT dan Perlindungan Anak

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.32 WIB

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Rabu (4/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Syarifah Munira, serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.

Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.

Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.

Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.

ACEH

Tutup Maulid, Ketua DPRK Irwansyah Ajak Para Orang Tua Tingkatkan Ilmu Parenting Kekinian

Oleh Redaksi · 9 Nov, 18.05 WIB

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Irwansyah menekankan kepada orang tua agar meningkatkan ilmu parenting. Pesan itu disampaikan Irwansyah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan TPQ Fathun Qarib di kompleks Masjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry, Minggu (8/11/2026).

Di hadapan para orang tua dan wali santri TPQ serta masyarakat yang hadir, Irwansyah mengingatkan pentingnya perhatian orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak di rumah.

Ia mengajak para orang tua untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dalam mendidik anak, mempelajari ilmu parenting terbaru, serta membangun hubungan yang lebih bersahabat dengan anak.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan lingkungan kehidupan yang sangat dahsyat. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

“Karena itu, orang tua tidak boleh terus menggunakan pendekatan pendidikan yang sama tanpa mempertimbangkan perubahan zaman,” kata Irwansyah.

Irwansyah menambahkan salah satu persoalan pendidikan keluarga dewasa ini bukan semata-mata kurangnya perhatian orang tua kepada anak, melainkan terkadang kurang tepatnya cara orang tua menyampaikan perhatian tersebut.

“Ada orang tua yang sangat mencintai anaknya, tetapi komunikasi yang dibangun justru membuat anak takut berbicara. Ada yang menginginkan anaknya menjadi pribadi disiplin, tetapi terlalu sering menggunakan ancaman. Ada pula yang mengharapkan anak tumbuh mandiri, tetapi seluruh keputusan anak selalu ditentukan orang tua,” ujarnya.

Anak-anak hari ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dengan lingkungan masa kecil orang tuanya. Mereka berhadapan dengan telepon pintar, permainan digital, media sosial, video pendek, kecerdasan buatan, dan berbagai informasi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Soal Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran, PDIP: Kita Lihat Nanti di Paripurna DPR

Oleh Redaksi · 10 Nov, 11.32 WIB



BANDA ACEH -Fraksi PDI Perjuangan DPR RI merespons kemungkinan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, komunikasi antaranggota DPR terkait persoalan tersebut terus berjalan.

Namun, ia belum memastikan apakah akan ada anggota yang menyampaikan usulan dalam rapat paripurna DPR.

"Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam di, di apa, di paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti," ujar Andreas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Andreas menegaskan, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader bersuara lantang terhadap persoalan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, tetap menjadi perhatian serius kader banteng di Parlemen.

Terlebih, sudah dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR.

"Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan eh sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu eh ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR. Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan eh di pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga eh mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul," jelasnya.

Terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat dibandingkan hak lainnya, Andreas menilai mekanisme tersebut lebih rasional dan efektif dari sisi waktu.

"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling apa, ya rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu," katanya.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah usulan tersebut akan langsung disampaikan dalam rapat paripurna DPR kali ini.

"Ah belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang," tandasnya.

Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan Hak Angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.

"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Minta Prabowo Beri Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.24 WIB



BANDA ACEH - - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Dia mengatakan, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wapres di tengah dinamika terkait persoalan dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo mengungkapkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN.

"Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden pun juga memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," katanya.

Prasetyo pun menegaskan Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran. Dia sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai sikap Presiden dalam pertemuan tersebut.

"Bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden," ucap dia.

Saat ditanya apakah permintaan waktu Gibran untuk membuktikan dokumen tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan Politik antara Prabowo dan Gibran, Prasetyo mengaku belum dapat memastikan hal itu.

"Ya kita belum sejauh itu ya," ujarnya

ACEH

Irwansyah Serukan TPG Perempuan Berperan Atasi KDRT dan Perceraian

Oleh Redaksi · 9 Nov, 16.32 WIB

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) untuk lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat gampong, terutama menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.

Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh yang berlangsung di Gedung DPRK Rabu (4/11/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRK Syarifah Munira, serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.

Dalam pertemuan itu, Irwansyah menyampaikan bahwa amanah yang diemban perempuan anggota TPG kini semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.

Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam membantu menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.

Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Di antaranya, masih adanya anggota TPG perempuan yang menghadapi hambatan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, ada yang mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan untuk mengurus persoalan gampong.

Menanggapi hal tersebut, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi semacam lembaga legislatif di tingkat gampong yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila berbagai persoalan dapat diselesaikan di tingkat gampong, hal tersebut secara langsung akan membantu pemerintah kota dalam mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

MSI Aceh Angkat Sosok Teungku Fakinah dalam Seminar Nasional Sejarah

Oleh Redaksi · 9 Nov, 17.36 WIB

BANDA ACEH – Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Provinsi Aceh akan menggelar seminar nasional untuk membahas sosok Teungku Fakinah, ulama perempuan sekaligus pejuang dalam Perang Aceh yang dinilai belum banyak dikenal masyarakat luas.

Seminar bertajuk “Teungku Fakinah: Ulama dan Pahlawan Perempuan yang Terlupakan” tersebut dijadwalkan berlangsung di Auditorium Lantai III Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala (USK), Selasa (10/11/2026).

“Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi kesejarahan masyarakat Aceh, terutama mengenai sejarah dan peran perempuan dalam perjuangan bangsa,” kata Ketua Panitia, Teuku Bahagia Kesuma, Senin (9/11/2026).

Teuku Bahagia mengatakan, sosok Teungku Fakinah memiliki peran penting dalam sejarah Aceh. Ulama perempuan tersebut dikenal sebagai pendidik sekaligus panglima perang yang terlibat dalam perjuangan melawan kolonial Belanda.

Teungku Fakinah diperkirakan lahir pada 1856 di Lam Diran, Gampong Lam Krak, Kecamatan Siampang Tiga, Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga ulama dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan dayah.

Sejak muda, Teungku Fakinah dikenal memiliki kemampuan keilmuan hingga dipercaya mengajar dan memimpin dayah.

Ketika Belanda melancarkan agresi ke Aceh dan sejumlah dayah menjadi sasaran penghancuran, Teungku Fakinah turut terjun dalam perjuangan.

Ulama perempuan itu, kata Teuku Bahagia, meninggalkan aktivitas pendidikan untuk mengangkat senjata dan memimpin pasukan dalam perlawanan terhadap kolonial …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

NasDem: Jika Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Jalankan Sesuai Konstitusi!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 11.36 WIB



BANDA ACEH -Pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait wacana pemakzulan dinilai sebagai sikap yang rasional dan berlandaskan konstitusi.

Menindaklanjuti itu, Anggota DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani mengatakan bahwa, sikap tersebut tidak bisa dimaknai sebagai dukungan ataupun penolakan terhadap wacana pemakzulan.

Sebab, Surya Paloh menitikberatkan persoalan pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

"Ketua umum saya, Bapak Surya Paloh, memberikan pernyataan paling rasional. Beliau bilang, jika syaratnya sudah cukup, ya jalankan saja. So what jika syaratnya cukup? Kan itu sesuai dengan konstitusi?" ujarnya kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

Ia menegaskan, Surya Paloh merupakan tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai restorasi sehingga tidak sepatutnya mengabaikan data dan fakta dalam menyikapi persoalan kenegaraan.

Karena itu, ia meminta semua pihak, baik yang mendukung maupun menolak pemakzulan, agar tidak keliru menafsirkan pernyataan Surya Paloh sebagai bentuk keberpihakan Politik.

"Artinya, yang ingin memakzulkan dan yang tidak ingin, jangan menilai beliau bicara soal dukung atau tidak dukung. Tetapi, beliau bicara berdasarkan konstitusi," tegasnya.

Ia menilai, pemenuhan persyaratan konstitusional harus menjadi landasan utama dalam menyikapi wacana pemakzulan.

“Bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan atau preferensi politik kelompok tertentu,” pungkasnya.

Wacana pemakzulan Gibran dan penggunaan Hak Angket kembali menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan Subhan Palal.

"742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan kasasi yang tercantum dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Melalui putusan itu, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019 tidak sah secara hukum.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 juga mencantumkan pertimbangan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Majelis hakim konstitusi saat itu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mundur dari Partai Solidaritas Indonesia, Tiga Loyalis Jokowi Berpaling ke Prabowo Subianto

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.15 WIB



Gambar ini menampilkan kolase tiga anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang telah mengudurkan diri. Mereka mengenakan jaket merah khas partai tersebut. Di sisi kanan, Raja Juli

JAKARTA - Mundurnya tiga figur penting Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, dinilai bukan sekadar keputusan personal.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, langkah tersebut bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ketiganya mulai memilih merapat ke Presiden Prabowo Subianto ketimbang terus berada dalam barisan Politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Adi, keputusan mundur itu tidak terlepas dari perkembangan politik terkini yang dinilai semakin tidak menguntungkan bagi kepentingan politik Solo yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi.

"Publik memberikan analisa yang cukup realistis bahwa jangan-jangan elite PSI ini mundur karena memang situasi politik saat ini sedang berkembang tidak terlampau menguntungkan kepentingan politik Solo," kata Adi, Selasa, 10 November 2026.

Ia menilai, posisi politik Jokowi belakangan semakin melemah dan mulai ditinggalkan sejumlah pihak. Kondisi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari hubungan Prabowo dan Jokowi yang disebut semakin retak.

Adi melihat, mundurnya tiga elite PSI tersebut menyiratkan pilihan politik untuk lebih dekat dengan Prabowo dibandingkan mempertahankan loyalitas kepada Jokowi.

"Ketika tiga orang ini mundur menyiratkan mereka lebih ingin bersama Prabowo ketimbang terus bersama dengan Jokowi yang memang selalu mendapat serangan isu-isu yang tidak menguntungkan," ujarnya.

Adi menambahkan, ketiga figur tersebut selama ini dikenal sebagai orang-orang yang berada di barisan terdepan membela Jokowi. Loyalitas mereka terlihat ketika Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

Namun, setelah Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan, ketiganya justru memilih meninggalkan PSI. Adi menilai keputusan itu menunjukkan kalkulasi politik untuk menyelamatkan posisi masing-masing.

"Ketiga orang ini dianggap rasional. Mereka menyelamatkan posisi politik masing-masing," pungkasnya.

NASIONAL

KNPI Geruduk Mabes Polri: Penyadapan Presiden Merupakan Perbuatan Makar!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 11.25 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama, mengecam keras dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diduga melibatkan oknum petinggi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).Haris menilai, apabila dugaan tersebut benar terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam institusi negara, maka persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran etika maupun penyalahgunaan kewenangan, melainkan tindakan yang sangat serius karena menyangkut keselamatan kepala negara, kedaulatan pemerintahan, serta keamanan nasional.

Menurut Haris, penyadapan terhadap Presiden oleh oknum yang seharusnya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan makar karena berpotensi mengganggu stabilitas dan kewibawaan pemerintahan yang sah.

"Jika benar ada oknum dan kelompok tertentu yang melakukan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, maka ini merupakan persoalan luar biasa serius. Saya menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan makar. Bagaimana mungkin ada aparat yang seharusnya menjaga negara justru diduga melakukan tindakan yang mengancam keamanan dan kewibawaan kepala negara?" tegas Haris Pertama saat orasi aksi damai di depan Markas Besar Polri pada Senin, 9 November 2026.

Ia juga melontarkan pernyataan keras dengan menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan yang lebih kejam dari PKI. Pernyataan itu menggambarkan keprihatinannya terhadap dugaan pengkhianatan terhadap pemimpin negara.

Menurutnya, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar. Ancaman juga dapat muncul dari dalam institusi apabila kewenangan dan kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

"Penyadapan terhadap Presiden oleh oknum aparat yang memiliki kewenangan negara adalah tindakan yang sangat kejam. Bahkan, saya menyebut tindakan ini lebih kejam dari PKI. Sebab, ketika aparat yang diberikan kepercayaan untuk melindungi negara justru diduga melakukan tindakan yang membahayakan kepala negara, maka kepercayaan terhadap institusi negara sedang dipertaruhkan," ujar Haris.

Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus peringatan agar tidak ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kedudukan di institusi negara.

Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, DPP KNPI menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Masa Depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Makin Rumit Usai Ditinggal Tiga Elite

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.12 WIB



Tiga buah bendera putih dengan logo merah-hitam dan tulisan 'PSI Partai Super Tbk.' terpasang pada tiang-tiang di bawah langit yang cerah. Latar belakangnya juga menampilkan beberapa

BANDA ACEH - Masa depan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah ditinggalkan tiga figur pentingnya menjadi tanda tanya.

Terlebih, PSI sebelumnya menunjukkan kepercayaan diri menghadapi Pemilu mendatang dengan target menembus parlemen hingga masuk tiga besar.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, mundurnya tiga elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menjadi tantangan serius bagi partai berlambang gajah tersebut untuk menjaga daya saing Politik.

Menurutnya, membangun partai politik agar kompetitif dan mampu lolos ke parlemen bukan perkara mudah.

Terlebih, ketiga figur tersebut selama ini menjadi salah satu pilar penting PSI.

"Kalau elite ini tidak lagi aktif di PSI, bagaimana partai ini akan kompetitif di masa mendatang. Ini yang saya sebut rumit serumit-rumitnya," kata Adi, Selasa, 10 November 2026.

Ia mengatakan, ambisi PSI untuk lolos ke parlemen, bahkan menargetkan posisi tiga besar, membutuhkan kerja politik dan konsolidasi yang tidak sederhana.

Kondisi semakin menantang karena tiga figur yang selama ini menjadi bagian penting kekuatan PSI justru memilih tidak lagi aktif di partai.

Adi pun menyoroti peran mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokomotif utama yang diharapkan mampu menggerakkan mesin politik PSI.

"Tinggal kita tunggu bagaimana kerja politik yang akan diorkestrasi oleh Jokowi sebagai lokomotif utama meloloskan partai berlambang gajah ini ke parlemen untuk pertama kalinya," ujarnya.

Menurut Adi, konsolidasi politik PSI ke depan akan menjadi penentu apakah partai tersebut mampu tetap kompetitif, lolos ke parlemen, dan diperhitungkan dalam peta politik nasional.

"Tinggal kita tunggu konsolidasi kerja politik PSI apakah membuat partai ini kompetitif, lolos ke parlemen, dan diperhitungkan di masa mendatang," pungkasnya.

NASIONAL

Gibran Dampingi Prabowo di Istana Usai Sampaikan Niat Mundur dari Wapres

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.09 WIB



Prabowo Subianto mengenakan jas abu-abu dan Gibran Rakabuming Raka dengan jas hitam berjalan di koridor berkarpet biru di Istana Negara. Di sebelah kanan mereka terdapat deretan

BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir ke acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11).

Pantauan dari YouTube Sekretariat Presiden, Gibran dan Prabowo berjalan beriringan ke ruang tengah Istana Negara.

Gibran mengenakan jas hitam dipadu dengan dasi biru muda, sedangkan Prabowo mengenakan jas double breasts abu-abu.

Setelahnya, Gibran berdiri di samping Ketua MPR Ahmad Muzani.

Kemudian, acara dimulai dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya.

Kehadiran Gibran menjadi sorotan di tengah niatannya untuk mundur sebagai Wakil Presiden.

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo dan Gibran telah bertemu pada Selasa (10/11) pagi.

Pras menyebut dalam pertemuan itu Gibran menyatakan niatannya untuk mengundurkan diri.

Merespons itu, Prabowo disebut tak menolak permintaan itu. Bersamaan dengan itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA-nya yang selama ini dipersoalkan lewat PTUN.

NASIONAL

Dikabarkan Mundur, Gibran Bakal Fight di PTUN Buktikan Keabsahan Ijazah

Oleh Redaksi · 10 Nov, 18.59 WIB



Gambar ini menampilkan wajah Gibran Rakabuming Raka di tengah latar belakang gedung Mahkamah Konstitusi dan suasana persidangan. Di bagian depan, tampak tangan seseorang sedang membuka tumpukan dokumen tua yang diikat dengan rantai besi dan tali tambang. Komposisi ini

JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara menanggapi kabar pengunduran dirinya yang sebelumnya diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Selasa, 10 November 2026, Gibran mengaku menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat di tengah dinamika Politik yang berkembang.

Dia berharap persoalan tersebut tidak berlarut-larut menjadi polemik politik.

"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran.

Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.

Dia menyebut Prabowo sudah dianggap seperti ayah sendiri.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas polemik keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikan Gibran.

Menurut Gibran, Prabowo menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung)," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuannya dengan Prabowo.

Prasetyo juga menyinggung polemik hukum yang tengah dihadapi Wakil Presiden tersebut.

NASIONAL

Hanum Rais Minta Jangan Langsung Percaya Gibran Mau Mundur, 'Bapak Anak Suka Sen Kanan Belok Kiri'

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.31 WIB



BANDA ACEH - Putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais, mengingatkan publik agar tidak terburu-buru mempercayai kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.Hanum menyampaikan hal tersebut setelah muncul informasi bahwa Gibran berniat mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika Politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Seeing is believing. Baru 'berniat'. Ingat, bapak anak suka sen kanan belok kiri. Hati-hati," kata Hanum dalam keterangannya.

Sebelumnya, pihak Istana membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa (10/11/2026) pagi.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Namun, Presiden juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Setelah berdiskusi, Gibran kemudian meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar Prasetyo.

NASIONAL

Kejagung Dalami Hubungan Listyo Sigit dengan Bos Nikel Arif Kurniawan

Oleh Redaksi · 10 Nov, 15.11 WIB



BANDA ACEH - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku masih mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan (AK) dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi usai menghadiri rakor di Kemenko Polkam pada Senin (9/11).

"Kita masih mendalami (hubungannya)," ujarnya kepada wartawan.

Kuntadi menambahkan saat ini penyidik masih belum bisa memastikan apakah Listyo Sigit benar menjadi beking dari aktivitas tambang nikel Arif Kurniawan.

Ia memastikan korps Adhyaksa bakal mendalami perkara nikel ini agar bisa terungkap secara terang benderang.

"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," tuturnya.

Sebelumnya Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan. Enam perusahaan tersebut berinisial PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA dengan luas IUP 1.036 hektare, dan PT ANI dengan luas IUP 106 hektare.

Kemudian, PT AMI dengan luas IUP 1.000 hektare, PT AMID dengan luas IUP 1.026 hektare, dan PT HJ. Keenam perusahaan tersebut dikendalikan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Adapun penyidik telah menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir pada 2015, kedua perusahaan tersebut tetap melanjutkan aktivitas tambangnya melalui skema suspend. Padahal, seharusnya IUP kedua perusahaan dikembalikan kepada negara.

NASIONAL

Raja Juli dan Giring Harusnya Mundur Juga dari Lingkar Istana Jika Punya Malu

Oleh Redaksi · 10 Nov, 11.27 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menuai sorotan.

Kritikus Politik sekaligus Founder Sinkos Indonesia, Faizal Assegaf, mengaitkan keputusan keduanya dengan kondisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, sementara Giring tercatat sebagai anggota partai tersebut.

"Nggak heran, rame-rame mundur dari PSI karena satu alasan: Posisi Gibran sudah oleng. Tak bisa diselamatkan," kata Faizal lewat akun X miliknya, dikutip 10 November 2026.

Ia bahkan meminta keduanya tidak hanya mundur dari partai, tetapi juga meninggalkan lingkaran Istana.

"Kalau masih punya malu, mundur juga dari lingkar Istana. Agar tidak berperan sebagai jejaring penyadapan," sambungnya.

Di sisi lain, Raja Juli menjelaskan keputusannya mundur dari jajaran pengurus PSI diambil agar dapat mencurahkan seluruh waktunya untuk mengawal program prioritas pemerintah di sektor kehutanan.

Sementara itu, Giring mengungkapkan bahwa sejak awal terjun ke dunia politik, cita-citanya adalah menjadi pelayan publik yang mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia.

Ia juga mengenang momen pada September 2024 ketika Presiden Prabowo Subianto menelepon dan mengajaknya bergabung dalam pemerintahan.

"Tanpa ragu saya menjawab, 'Siap Bapak Prabowo, Siap Bapak Presiden'," kata Giring.

Dua tahun mengabdi di Kabinet Merah Putih, Giring mengaku semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani bangsa dan negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, semakin memperkuat tekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Namun, ia mengaku mulai merasakan adanya perbedaan arah perjuangan dalam perjalanan politiknya di PSI.

"Namun dalam perjalanan berpartai, saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi, yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," demikian Giring.

NASIONAL

Kader PKS Klarifikasi Kertas Viral "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan"

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.01 WIB



BANDA ACEH -Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menjelaskan alasan membawa kertas bertuliskan "Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan" yang viral di media sosial.

Tulisan tersebut, menurutnya, merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Yanuar mengatakan, aspirasi tersebut tidak sempat disampaikan melalui interupsi dalam sidang paripurna.

"Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham," kata Yanuar kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Ia menegaskan, penyampaian aspirasi itu berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat. Yanuar mengaku telah menandatangani usulan tersebut dan meminta pimpinan DPR memprosesnya ke tahap berikutnya.

"Saya sudah bertanda tangan karena saya merasa nalar kewarasan publik kita sebagai rechtstaat, negara hukum ini diuji," ujarnya.

Yanuar juga mengungkapkan, dorongan agar Gibran mundur atau dimundurkan disebutnya berasal dari aspirasi konstituen di daerah pemilihannya, Banyumas-Cilacap. Aspirasi itu, kata dia, diserap ketika turun reses dan berdialog dengan warga.

"Hampir semua forum yang saya datangi saat reses itu, jadi konstituen saya menginginkan Mas Gibran itu mundur. Atau kalau nggak mau mundur ya dimundurkan," tuturnya.

Ia menyebut, aspirasi tersebut berkaitan dengan peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, Yanuar menilai aspirasi warga perlu disampaikan dan diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional di DPR.

"Jadi kami sebagai anggota DPR dan saya juga sekarang ditugaskan oleh fraksi di BAM (Badan Aspirasi Masyarakat), tentu aspirasi itu harus kita angkat dan kita perjuangkan," tandasnya

NASIONAL

Ternyata PDIP Belum Ajukan Pemakzulan Gibran, Tunggu Salinan Putusan MA

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.09 WIB



BANDA ACEH - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI belum menentukan langkah untuk mengajukan hak menyatakan pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PDIP masih menunggu dan mempelajari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) secara utuh sebelum mengambil keputusan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan fraksinya terbuka menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai kebutuhan Politik. Namun, langkah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan persyaratan administratif yang berlaku.

"Prinsipnya kalau Fraksi PDI Perjuangan akan terbuka menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai dengan kebutuhan politik yang diperlukan," kata Dolfie di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Menurutnya, salinan putusan MA perlu dipelajari secara menyeluruh agar fraksi tidak keliru menafsirkan pertimbangan hukum maupun implikasinya. Ia menegaskan, membaca amar putusan saja tidak cukup untuk menentukan langkah politik.

"Kita kan harus baca secara utuh pertimbangan hukumnya apa, implikasi dari pertimbangan hukum apa, kan kita harus baca secara utuh. Seperti kita melihat putusan MK," ujarnya.

Dolfie menambahkan, komunikasi politik dengan fraksi-fraksi lain telah berjalan sejak masa reses. Meski demikian, ia menyebut belum ada keputusan formal terkait dukungan lintas fraksi untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.

Ia menegaskan, langkah politik tersebut tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Kebutuhan politik itu harus ada landasan syarat-syarat administratifnya dan syarat-syarat perundang-undangannya. Nggak bisa kita langgar juga," tegasnya

NASIONAL

Rocky Gerung Kasih ‘Bocoran Alus’ Ciri Ketua Partai yang Terlibat Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 10 Nov, 13.40 WIB



BANDA ACEH - Akademisi yang kini menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres), Rocky Gerung, menyinggung kabar tentang seorang ketua partai yang disebut ikut dalam pembicaraan terkait dugaan makar. Ia menyampaikannya dalam perbincangan dengan Rhenald Kasali di kanal YouTube Rhenald Kasali, yang tayang 9 November 2026. Rocky tidak menyebut nama.

“Sekarang mulai dibuka kecil-kecil bahwa ada seorang ketua partai ikut dalam pembicaraan yang ada hubungannya dengan proses makar-memakar ini,” ujarnya. Ia menyebut kabar tersebut sudah beredar di publik.

Soal identitasnya, Rocky memberi gambaran umum. Sosok itu, katanya, kemungkinan seseorang yang selama ini kontroversial tetapi memiliki kekuasaan besar untuk mengatur oligarki.

“Kira-kira indikasinya begitu,” katanya.

Rocky juga menyebut publik kini mulai menduga arah dan tujuan akhir (end game) dari rangkaian peristiwa ini. Menurutnya, jika end game bisa diduga, berarti sejak awal ada perencanaan yang matang.

“Pertanyaan publik sekarang siapa aktor intelektualnya, end game-nya apa,” kata Rocky.

Ia memperkirakan pihak-pihak yang terlibat akan melakukan konsolidasi perlawanan. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, saksi atau tokoh kunci bisa berada dalam risiko. Rocky menyebut keadaan semacam ini sebagai “anything goes”.

Rocky menilai Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar pintar, tetapi berpikir strategis. Ia menduga Presiden sudah lama membaca potensi gejolak dan menunggu momentum. Menurutnya, penggantian-penggantian posisi belakangan ini, termasuk Kapolri, menjadi bagian dari proses itu.

NASIONAL

Gibran Terancam Dimakzulkan, PKB Selangkah Lagi ke Hak Menyatakan Pendapat

Oleh Redaksi · 10 Nov, 11.40 WIB



BANDA ACEH - - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertimbangkan dan memfinalisasi penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, usulan pemakzulan Gibran juga tengah mengemuka belakangan ini.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, persoalan ijazah Wapres Gibran menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, opsi penggunaan HMP ideal.

“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi Politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” ujar Khozin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Dia menegaskan, PKB tidak sedang berpindah haluan sebagai pendukung pemerintah, tetapi sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Menurutnya, Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah.

“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” kata Khozin.

Dia menyebut Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.

Kendati demikian, Khozin mengakui persoalan ijazah Wapres Gibran yang telah diputuskan MA dan ada pertimbangan hukum MK ini akan memunculkan perdebatan konstitusional.

Pertanyaan konstitusional tersebut, lanjut Khozin, menjadi bagian penting dalam argumentasi konstitusional yang harus dinyatakan oleh DPR sebagai bagian penting dalam penggunaan HMP

ACEH

6 BERITA

ACEH

Komunitas Cahaya Inoeng Dorong Perempuan Jadi Penggerak Keluarga Sehat

Oleh Redaksi · 10 Nov, 21.36 WIB



BANDA ACEH – Komunitas Cahaya Inoeng (KCI) menggelar Kajian Umum sekaligus Soft Launching dengan tema "Sehat Ala Rasulullah SAW" di Meunasah Baburrahman, Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Ustadz Febri Sugianto, praktisi kesehatan herbal dan pakar Thibbun Nabawi dari Bogor, sebagai narasumber utama.

Turut hadir Owner Rumoh Bieng, Aral Yusni, para pimpinan Majelis Taklim, pengurus TP PKK Gampong, kader Posyandu, anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Kehadiran KCI diharapkan menjadi wadah kolaborasi dan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan nilai keislaman, dan kepedulian sosial.

Ketua Komunitas Cahaya Inoeng, Santi Zuhra, SHI, mengatakan KCI dibentuk sebagai ruang bagi perempuan untuk belajar, mengembangkan potensi, memperkuat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin Cahaya Inoeng menjadi rumah bersama bagi perempuan untuk belajar, bertumbuh, berkarya, dan saling menguatkan. Perempuan yang berilmu akan melahirkan keluarga berkualitas, perempuan yang sehat memperkuat ketahanan keluarga, dan perempuan yang berdaya menjadi penggerak kemajuan masyarakat," ujar Santi.

Santi mengatakan, nama Cahaya Inoeng memiliki filosofi yang mencerminkan harapan besar terhadap peran perempuan Aceh.

Kata Cahaya melambangkan ilmu pengetahuan, harapan dan kebermanfaatan. Sementara Inoeng, yang berarti perempuan dalam bahasa Aceh, menggambarkan perempuan yang beriman, berilmu dan mandiri, tangguh dan peduli terhadap sesama.

Menurutnya, KCI akan mengembangkan kegiatan pendidikan keislaman, kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, parenting, serta kepedulian sosial.

Santi juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Majelis Taklim, Posyandu, TP PKK, KWT, dan berbagai komunitas perempuan agar program yang dijalankan memberikan manfaat lebih luas.

"Cahaya Inoeng tidak hadir untuk menggantikan organisasi yang telah ada. Kami ingin menjadi mitra kolaborasi, menyatukan potensi perempuan, dan membangun gerakan kebaikan yang berkelanjutan," ungkap Santi.

Sementara itu, Pembina KCI, Farid Nyak Umar, ST, menegaskan bahwa komunitas tersebut tidak didirikan sekadar untuk menambah organisasi perempuan, tetapi untuk menghadirkan gerakan sosial yang memberikan manfaat nyata.

"Cahaya Inoeng tidak boleh berhenti sebagai sebuah nama atau organisasi. Komunitas ini harus menjadi gerakan perubahan yang mampu menghadirkan solusi bagi persoalan perempuan, keluarga, dan masyarakat," ujar Farid yang juga Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Bupati Aceh Barat: Abdi Negara Adalah Pahlawan Masa Kini

Oleh Aceh Barat · 10 Nov, 21.02 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM menyampaikan amanat saat memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026,FOTO/ist

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026 di halaman Kantor Bupati Aceh Barat, Selasa (10/11/26).

Dalam amanatnya, Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai perjuangan tersebut, menurutnya, harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mengisi kemerdekaan.

"Pahlawan adalah mereka yang dahulu berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka rela mengorbankan apa saja, bahkan nyawa, demi rakyat dan kesejahteraan bangsa," ujar Tarmizi.

Ia menegaskan, makna kepahlawanan di masa kini tidak hanya tentang perjuangan mengangkat senjata, tetapi juga diwujudkan melalui upaya menjaga kemerdekaan, merawat persatuan, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, seluruh aparatur negara, apa pun profesinya, memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan masa kini melalui pengabdian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Oleh karena itu, jika tidak mampu melakukan seperti yang telah diperjuangkan para pahlawan demi negara ini, setidaknya jangan melakukan hal yang bertentangan dengan perjuangan mereka. Kalau tidak bisa menjadi obat, jangan menjadi penyakit," tegasnya.

Tarmizi berharap pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pihak, khususnya aparatur negara, agar terus menjaga amanah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Kapolda Aceh Ikuti Upacara Ziarah Nasional Hari Pahlawan di TMP

Oleh Redaksi · 10 Nov, 12.33 WIB



BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengikuti upacara Ziarah Nasional dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026 di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kota Selasa (10/11/2026).

Upacara tersebut dipimpin Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigjen TNI Mahesa Fitriadi dan dihadiri unsur Forkopimda Aceh, TNI-Polri, serta ASN.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan". Tema tersebut menjadi momentum untuk meneladani nilai-nilai perjuangan, semangat pantang menyerah, serta pengabdian tanpa pamrih para pahlawan bangsa.

Rangkaian upacara diisi dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, serta tabur bunga di pusara para pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Semangat kepahlawanan harus terus dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Momentum Hari Pahlawan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu dengan bekerja tulus, disiplin, dan berintegritas demi kemajuan bangsa.[]

ACEH

Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Zulkifli Ajak Masyarakat Teladani Semangat Juang Pahlawan

Oleh Redaksi · 10 Nov, 16.07 WIB



BANDA ACEH, SABANG – Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus melalui perjuangan besar, tetapi dapat dimulai dari kerja nyata, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat inilah yang menjadi pesan dalam peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di Kota Sabang. Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) di Lapangan Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Selasa (10/11).

Dalam upacara tersebut, Wali Kota Sabang membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang mengangkat tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan".

Dalam sambutan itu disampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan sekadar momentum untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat akan tanggung jawab generasi saat ini dalam meneruskan cita-cita perjuangan melalui pengabdian dan kerja nyata.

Mensos RI turut menekankan pentingnya pembangunan manusia melalui pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya memperluas kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan arah pembangunan nasional yang menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian penting dari kemajuan bangsa.

Sejalan dengan pesan tersebut, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan sebagai inspirasi dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing, terutama melalui pengabdian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita lanjutkan melalui kerja nyata. Setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, daerah, dan bangsa," ujar Zulkifli.

Wali Kota Sabang juga menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas sosial dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

"Melalui kebersamaan, saling mendukung, dan kepedulian terhadap sesama, kita dapat menghadapi berbagai tantangan serta mengambil bagian dalam mewujudkan Sabang yang lebih baik," tambahnya.

Upacara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal, jajaran Pemerintah Kota Sabang, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, insan pers, serta peserta upacara lainnya.

Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di laut Sabang menggunakan Kapal KAL Iboih milik TNI Angkatan Laut. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

9 Sekolah di Aceh Barat Gandeng UIN Ar-Raniry, Cetak Siswa Berdaya Saing Global

Oleh Aceh Barat · 10 Nov, 12.32 WIB



Penandatanganan MoA antara UIN Ar-Raniry dan sembilan sekolah di Aceh Barat untuk meningkatkan kompetensi bahasa asing siswa dan tenaga pendidik, Senin (9/11/2026).FOTO/ist

MEULABOH – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menjalin kerja sama dengan sembilan sekolah menengah atas dan madrasah di Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing siswa dan tenaga pendidik.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Senin (9/11/2026). Program ini akan dilaksanakan melalui Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry.

Sembilan sekolah yang terlibat yakni SMAN 1 Woyla Barat, SMAN Woyla, SMAN 4 Wira Bangsa, MAN 2 Aceh Barat, MA Ruhul Qur'ani, SMAN 2 Meulaboh, MAN 3 Aceh Barat, MAS Woyla, dan SMAN 1 Meulaboh.

Penandatanganan MoA tersebut disaksikan Rektor UIN Ar-Raniry, Wakil Ketua MPU Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, serta sejumlah undangan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, T Kamarisal, S.Pd.I., M.Si., mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan pendidikan dan persaingan global.

Menurutnya, kesempatan mengikuti program peningkatan kompetensi bahasa asing sebelumnya lebih banyak diberikan kepada madrasah. Melalui kerja sama ini, sekolah umum juga memperoleh peluang yang sama.

"Di era digitalisasi, penguasaan bahasa internasional menjadi sangat penting. Kita berharap kerja sama ini memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Aceh Barat," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui berbagai program, termasuk mempersiapkan siswa mengikuti kegiatan dan kompetisi bertaraf internasional.

Sementara itu, Kepala UPT Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry, T Murdani, Ph.D., mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada bahasa Inggris, tetapi juga mencakup bahasa Arab, Turki, dan Jepang.

Sebagai bentuk dukungan, UIN Ar-Raniry berencana mengirimkan tenaga pengajar ke Aceh Barat untuk memberikan pelatihan kepada para guru melalui program Training of Trainers (ToT).

"Pusat Pengembangan Bahasa UIN Ar-Raniry siap mendukung peningkatan kemampuan bahasa di sekolah, baik madrasah maupun SMA," katanya.

Melalui kerja sama ini, kemampuan bahasa asing siswa dan guru di Aceh Barat diharapkan semakin meningkat sehingga mampu memperluas peluang pendidikan sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Pj Sekda Aceh Serahkan Bungong Jaroe kepada Keluarga Pahlawan Nasional

Oleh Redaksi · 10 Nov, 13.43 WIB



BANDA ACEH – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, menyerahkan bungong jaroe (cenderamata) kepada keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026, yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (10/11/2026).

Penyerahan bungong jaroe tersebut merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi Pemerintah Aceh kepada keluarga dan ahli waris para pahlawan nasional serta pejuang kemerdekaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sebelumnya, Taufik juga mengikuti upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan yang dilanjutkan dengan upacara peringatan Hari Pahlawan di Lapangan Blang Padang. Kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Nasional Tahun 2026 di Aceh.

Dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa menghormati jasa para pahlawan tidak cukup hanya melalui seremoni peringatan saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian nyata.

Menurutnya, semangat kepahlawanan tersebut perlu diteruskan melalui upaya mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pendidikan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Menghormati jasa pahlawan bukan hanya sekadar mengenang perjuangan mereka, tetapi juga melanjutkan cita-cita luhur melalui pengabdian nyata bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga Pahlawan Nasional Teuku Umar, T. Nasruddin, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan adalah momentum untuk kembali merenungkan besarnya perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, ia turut menyampaikan sejumlah harapan dan aspirasi keluarga pahlawan serta pejuang kemerdekaan kepada Pemerintah Aceh.

Adapun keluarga pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan yang menerima bungong jaroe, yaitu:

• T. Nasruddin, ahli waris Pahlawan Nasional Teuku Umar;
• T.M. Daud, ahli waris Cut Nyak Dhien;
• Muhammad, ahli waris Tgk. Chik Di Tiro;
• T. Ardiansyah, ahli waris Cut Meutia;
• Cut Meurah Silfia, ahli waris Laksamana Malahayati;
• Cut Hachirna Fatiah, ahli waris Teuku Nyak Arif;
• Teuku Iskandar Syah, ahli waris Mr. Muhammad Hasan;
• Teuku Zainul Arifin Panglima Polem, ahli waris Sultan Iskandar Muda;
• Kolonel Purn. HM Djafar Karim sebagai pembela kemerdekaan RI
• Letkol Purn. Sadino sebagai pembela kemerdekaan RI.

Melalui momentum Hari Pahlawan ini, Pemerintah Aceh mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneruskan semangat perjuangan melalui karya dan pengabdian nyata demi mewujudkan Aceh yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

3 BERITA

HIBURAN

KKP Berdalih Soal Kontrak Belanja Influencer Raffi Ahmad

Oleh Redaksi · 10 Nov, 18.53 WIB



BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdalih soal kerja sama publikasi bernilai miliaran rupiah dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan dalam ekosistem bisnis pesohor Raffi Ahmad.

KKP menyatakan, pelibatan influencer dan kreator konten merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menjangkau masyarakat secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah belanja publikasi KKP melalui perusahaan milik Raffi Ahmad itu menjadi sorotan publik. Kementerian mengakui kritik dan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut.

"Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku," demikian keterangan resmi KKP, Selasa (10/11/2026).

KKP beralasan, publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas pokok kementerian untuk menyampaikan kebijakan strategis, program prioritas, hingga capaian kinerja kepada masyarakat.

Untuk itu, KKP mengklaim menerapkan strategi komunikasi multi platform. Skema tersebut tidak hanya mengandalkan influencer atau kreator konten digital, tetapi juga memanfaatkan media cetak, televisi, media digital, serta kanal komunikasi resmi pemerintah.

Kementerian juga menyebut, pemilihan mitra publikasi dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens (engagement rate), luas jangkauan komunikasi, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.

"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelas KKP.

KKP turut menegaskan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," sambungnya.

Meski telah memberikan penjelasan mengenai strategi komunikasi, KKP belum menguraikan secara terperinci nilai kontrak, rincian pekerjaan, keluaran publikasi, serta dasar perhitungan anggaran kerja sama dengan PT Rans Animasi Indonesia dalam keterangan tersebut.

Sementara, hingga berita ini diterbitkan, Raffi Ahmad belum merespon kepada Monitorindonesia.com terkait sorotan publik tersebut.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2023-2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam hasil penelusurannya, ICW menemukan delapan paket pengadaan yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Rinciannya, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud ristek) pada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Ade Armando: Lebih Baik Gibran Diberhentikan Lewat DPR Dibanding Diminta Mundur

Oleh Redaksi · 10 Nov, 13.44 WIB



BANDA ACEH - Pendukung sekaligus loyalis Joko Widodo, Ade Armando, menegaskan bahwa pihak pendukung Gibran Rakabuming Raka siap menerima risiko Politik terburuk, termasuk pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme resmi di DPR.Menurut Ade, jalur formal di parlemen jauh lebih tepat dibandingkan desakan agar Gibran mengundurkan diri secara sukarela.

Pernyataan tersebut disampaikan Ade Armando saat hadir dalam diskusi di saluran YouTube SinKos Indonesia pada 7 November 2026, merespons perdebatan mengenai keabsahan Surat Keterangan (Suket) Gibran pascaputusan Mahkamah Agung (MA).

"Tapi menurut saya, lebih baik dia diberhentikan melalui proses DPR, daripada meminta dia mengundurkan diri," tegas Ade Armando.

Ade menjelaskan bahwa keberadaan Gibran di kursi Wakil Presiden sejak awal merupakan respon atas pemanggilan politik untuk menyokong kemenangan Prabowo Subianto dalam Pemilu, bukan atas dorongan ambisi pribadi Gibran. Karena itu, jika proses hukum tata negara di Senayan berujung pada pemakzulan, pihak kubu Gibran akan menerimanya sebagai konsekuensi takdir politik.

"Buat kami, kalau dia sampai diberhentikan, wah, itu adalah nasib dia. Dia dulu memang dipanggil untuk memenangkan Pak Prabowo," ujar Ade.

Dalam perbincangan tersebut, Ade menceritakan latar belakang pencalonan Gibran yang menurutnya sempat ditolak sebanyak empat kali oleh Gibran sendiri karena ingin menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Solo atau maju ke tingkat Gubernur. Namun, pada permintaan kelima dari kubu Prabowo dengan mempertimbangkan tingginya angka survei, Gibran akhirnya bersedia maju.

Menanggapi wacana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun Hak Angket yang digulirkan oleh fraksi-fraksi di parlemen menyusul putusan MA, Ade menegaskan pendukung Gibran tidak akan melakukan perlawanan fisik maupun memicu kegaduhan publik.

"Kalau DPR mau mengatakan begitu, mau hak angketnya dilakukan atau hak menyatakan pendapat... buat kami di kubu Gibran enggak apa-apa, silakan putuskan saja dan kita tidak akan teriak-teriak, kita akan menerima itu dengan sangat besar hati," pungkas Ade.

HIBURAN

Proyek Rp14,7 Miliar di Dua Kementerian Diduga Tanpa Lelang, FORMASI Desak Raffi Ahmad Diperiksa

Oleh Redaksi · 10 Nov, 14.02 WIB



Jakarta, 9 November 2026 – Di tengah seruan efisiensi anggaran, dua kementerian justru mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad, guna membeli jasa pemengaruh (*influencer*).

Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara dengan rincian pendanaan sebagai berikut:

Kementerian dan Satuan Kerja	Tahun	Nama Paket	Nilai Kontrak
Kemendikbud Ristek, Museum dan Cagar Budaya	2024	Penayangan video YouTube Rans Entertainment	Rp452.698.902
		Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 (detik/second)	Rp205.893.300
		Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 (detik/second)	Rp575.655.000
		Event attendance	Rp2.521.329.200
		Penayangan TikTok Raffinagita1717 (detik/second)	Rp144.423.600
KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2025	*Influencer engagement*	Rp3.596.955.000
KKP, Setditjen Perikanan Budidaya	2025	*Influencer engagement* untuk pembangunan BINS	Rp3.600.000.000
KKP, Setditjen Perikanan Tangkap	2026	Jasa publikasi *influencer* Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna	Rp3.600.000.000
Jumlah			**Rp14.696.955.002**

BANDA ACEH - Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, mendesak aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Raffi Ahmad terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia di dua kementerian. Jalih menilai persoalan tersebut perlu diusut karena menyangkut transparansi penggunaan uang negara dan dugaan konflik kepentingan.Menurut Jalih, persoalan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai transaksi bisnis antara perusahaan swasta dengan pemerintah. Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Karena itu, keterkaitan perusahaan yang dimilikinya dengan proyek kementerian harus diperiksa secara terbuka, terutama menyangkut proses pengadaan, mekanisme penunjukan penyedia dan kemungkinan adanya pengaruh jabatan.

"APH harus segera turun tangan. Kortas Tipidkor Polri, Kejaksaan Agung dan KPK harus memeriksa Raffi Ahmad serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini. Jangan sampai ada konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat," tegas Jalih Pitoeng kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Sorotan tersebut mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.

Di lingkungan Kemendikbudristek, lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya terdiri atas penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, Instagram Reels Rp205.893.300, Instagram Story Rp575.655.000, jasa kehadiran dalam acara atau event attendance Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok Rp144.423.600. Jika dijumlahkan, nilai pengadaan tersebut mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Sementara itu, KKP tercatat mengadakan tiga paket jasa influencer dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Rinciannya, influencer engagement pada Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 sebesar Rp3.596.955.000, jasa influencer untuk pembangunan BINS pada Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, tahun 2026 sebesar Rp3,6 miliar.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

9 BERITA

LINGKUNGAN

Prabowo Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai di Sumatera

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 21.24 WIB



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan laporan terkait penanganan pascabencana Sumatera dalam konferensi pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Sumber Foto: BPMI Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.

JAKARTA – Pemerintah mempercepat penanganan sungai yang terdampak bencana di Sumatera setelah puluhan kejadian banjir susulan kembali menghambat proses pemulihan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar normalisasi sungai menjadi prioritas utama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa terdapat 41 kejadian banjir susulan di tiga provinsi tersebut selama periode April hingga Oktober 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan Tito pada Senin (9/11/2026), kejadian banjir susulan itu terdiri atas 18 kejadian di Aceh, delapan di Sumatera Utara, dan 15 di Sumatera Barat. Kondisi tersebut membuat upaya pemulihan infrastruktur menghadapi hambatan berulang karena sejumlah fasilitas yang sebelumnya telah diperbaiki kembali terdampak banjir.

Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan curah hujan, tetapi juga kondisi sungai yang masih mengalami sedimentasi. Material yang mengendap di aliran sungai dapat mengurangi kapasitas tampung air sehingga meningkatkan risiko luapan ketika hujan kembali turun.

Tito menyebut terdapat 137 sungai yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Rinciannya, 31 sungai berada di Aceh, 48 di Sumatera Utara, dan 58 di Sumatera Barat. Presiden meminta agar pekerjaan normalisasi dipercepat untuk mengurangi kemungkinan terjadinya banjir berulang.

Mengacu pada data Kementerian Pekerjaan Umum yang dipaparkan dalam pemberitaan ANTARA pada 9 November 2026, penanganan 137 sungai tersebut masih menyisakan pekerjaan di berbagai daerah. Di Aceh, 15 sungai telah selesai dinormalisasi, enam masih dalam pengerjaan, dan 10 lainnya belum ditangani.

Sementara di Sumatera Utara, 28 sungai telah selesai dikerjakan, enam masih dalam proses, dan 14 belum tersentuh penanganan. Adapun di Sumatera Barat, 12 sungai telah selesai dinormalisasi, 31 masih dikerjakan, dan 15 lainnya belum ditangani.

Selain sungai, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kondisi 38 muara di tiga provinsi tersebut. Sebanyak tujuh muara dilaporkan telah selesai dinormalisasi, 11 masih dalam pengerjaan, sedangkan 20 lainnya belum mendapatkan penanganan.

Pelaksanaan normalisasi akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Pemerintah juga mendorong daerah memanfaatkan anggaran yang telah tersedia untuk mempercepat pekerjaan, termasuk memperbaiki dan memperkuat tanggul di kawasan rawan banjir.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

SEJARAH

Sekcam Peukan Bada Jadi Narasumber, Promosikan Cagar Budaya, Wisata, dan Sejarah kepada Mahasiswa ISBI Aceh

Oleh Hamdani · 10 Nov, 20.52 WIB



Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Peukan Bada, Rusydi, S.Ag., M.Pd., saat menyampaikan pemaparan tentang potensi cagar budaya, wisata, dan sejarah Kecamatan Peukan Bada kepada

JANTHO - Peduli sejarah, cagar, dan seni budaya, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Peukan Bada, Rusydi SAg MPd menjadi narasumber dalam kegiatan bersama mahasiswa Program Studi (Prodi) Kajian Sastra dan Budaya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dengan memperkenalkan potensi cagar budaya, wisata, serta sejarah yang terdapat di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Minggu 8 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sekcam Peukan Bada memperkenalkan sejumlah situs bersejarah yang memiliki nilai penting bagi perjalanan sejarah dan kebudayaan Aceh.

Di antaranya adalah tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien, Balee Ikrar Lamteh, serta Makam Tgk. Chik Maharaja Gurah.

Melalui pemaparan tersebut, mahasiswa ISBI Aceh diajak untuk mengenal lebih dekat kekayaan sejarah dan budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Peukan Bada.

Sekcam Peukan Bada menyampaikan bahwa berbagai situs sejarah tersebut bukan hanya menjadi saksi perjalanan masa lalu, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi.

Menurutnya, pengenalan cagar budaya kepada kalangan mahasiswa merupakan salah satu langkah penting dalam menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian warisan sejarah dan budaya daerah.

Ia juga berharap mahasiswa ISBI Aceh dapat ikut berperan dalam memperkenalkan potensi wisata sejarah Peukan Bada melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dokumentasi, serta kreativitas seni dan budaya.

"Peukan Bada memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang patut kita jaga bersama. Kami berharap generasi muda, khususnya mahasiswa, dapat mengenal, mencintai, serta ikut mempromosikan warisan sejarah ini agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat luas," ungkapnya.

Kegiatan ini ldiharapkan menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah kecamatan dan kalangan akademisi, sekaligus mendorong pelestarian cagar budaya serta pengembangan wisata berbasis sejarah dan kearifan lokal di Kecamatan Peukan Bada.

Koordinator Program Studi (Prodi) Kajian Sastra dan Budaya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Muhammad Tahir MS didampingi humas ISBI Aceh, Muhammad Zacky MPd mengatakan kegiatan ini bertajuk Rihlah Budaya Mahasiswa ISBI Aceh.

"Melalui kegiatan rihlah budaya mahasiswa ISBI Aceh diharapkan mereka akan melek sejarah, cagar dan budaya di Aceh, terutama di Aceh Besar khususnya di Kecamatan Peukan Bada yang kita kunjungi dalam kesempatan ini, "katanya.

"Para mahasiswa sangat menikmati kegiatan rihlah budaya ini dan mereka akan menulis tentang perjalanan selama kegiatan rihlah budaya, "tutupnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Indonesia Siapkan Skema Baru Biayai Konservasi 13 Taman Nasional

Oleh Syarifudin Brutu · 10 Nov, 20.05 WIB



Masa depan bumi ada di tangan kita; mari menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi.

ANTALYA – Pemerintah Indonesia mulai menjajaki model pembiayaan baru untuk memperkuat perlindungan kawasan konservasi. Langkah tersebut diperkenalkan melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).

Rencana pembiayaan tersebut menyasar 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Pemerintah berupaya memperluas sumber pendanaan dengan melibatkan sektor swasta, lembaga keuangan, filantropi, serta mitra internasional.

Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan perlindungan kawasan konservasi tidak cukup hanya mengandalkan pola pendanaan konvensional. Menurutnya, dibutuhkan mekanisme pembiayaan berkelanjutan agar upaya pelestarian alam dapat berjalan dalam jangka panjang.

Indonesia sendiri memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, penguatan pendanaan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus memastikan manfaat konservasi dapat dirasakan masyarakat di sekitar kawasan.

Dalam forum COP31, Satgas juga memperkenalkan rancangan White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle yang dirancang untuk menghimpun, mengonsolidasikan, dan menyalurkan dana dari berbagai sumber.

Salah satu pendekatan yang dibahas adalah pemberian insentif bagi pengelola taman nasional untuk mengembangkan sumber pendapatan mandiri. Ekowisata, kemitraan strategis, dan model usaha berkelanjutan menjadi beberapa alternatif yang dipertimbangkan.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan sejumlah instrumen pembiayaan yang telah diterapkan atau dikembangkan dalam praktik konservasi internasional. Skema tersebut mencakup Biodiversity Credits, Project Finance for Permanence (PFP), Wildlife Conservation Bonds, serta pendanaan berbasis hasil yang mengacu pada model Rhino Bond.

Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa pengembangan skema pendanaan baru tidak berarti pemerintah menyerahkan kewenangan pengelolaan taman nasional kepada investor.

Menurut Rohmat, kawasan taman nasional tetap berada di bawah kendali negara dengan konservasi sebagai tujuan utama. Pemerintah juga tetap bertanggung jawab menentukan prioritas perlindungan, mengambil keputusan pengelolaan, serta melakukan pengawasan.

Kementerian Kehutanan turut menyiapkan transformasi pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pada empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti mekanisme dan persetujuan yang berlaku.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menyambut positif upaya pemerintah membangun sistem pembiayaan konservasi yang lebih terstruktur.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

APEC Melangkah Lagi, Tiongkok adalah Kekuatan Kepastian Paling Andal dalam Kerja Sama Asia-Pasifik

Oleh Redaksi · 10 Nov, 17.39 WIB



Pada November 2026, Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-33 akan digelar di Shenzhen. Ini adalah kali ketiga Tiongkok menjadi tuan rumah APEC, dua belas tahun setelah Pertemuan Beijing 2014. Dalam dua belas tahun itu, lanskap Asia-Pasifik telah berubah secara mendalam; unilateralisme dan proteksionisme berulang kali mengemuka, dan risiko pemutusan rantai pasok secara artifisial terus meningkat. Pada momen seperti ini, Tiongkok kembali mengambil tongkat estafet APEC dan menyampaikan sinyal yang jelas: ketika kerja sama Asia-Pasifik berada di persimpangan jalan, Tiongkok memilih membuka pintu, bukan membangun tembok; memilih bergandengan tangan, bukan melepaskan.Pada 2025, total nilai ekspor-impor Tiongkok dengan ekonomi anggota APEC lainnya mencapai 26,29 triliun yuan, mencakup 57,82% dari total nilai perdagangan luar negeri Tiongkok. Selama periode Rencana Lima Tahun ke-14, skala perdagangan ini secara kumulatif mencapai 125,49 triliun yuan, tumbuh 39,4% dibandingkan periode Rencana Lima Tahun ke-13. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi 13 ekonomi anggota APEC, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik mencapai 64,2%, sekaligus mendorong 37,6% pertumbuhan perdagangan barang dan 44,6% pertumbuhan perdagangan jasa di kawasan. Angka-angka ini bukan menunjukkan bahwa Tiongkok "bergantung" pada Asia-Pasifik, melainkan bahwa Tiongkok dan Asia-Pasifik telah membentuk hubungan rantai industri dan rantai pasok yang saling terkait erat serta saling memperkuat. Memisahkan Tiongkok dari ekonomi Asia-Pasifik secara artifisial tidak akan merugikan Tiongkok saja.

Kontribusi Tiongkok terhadap APEC jauh melampaui besaran perdagangan. Lebih dari tiga puluh tahun sejak bergabung dengan APEC, Tiongkok telah mengalami transformasi dari pelajar dan pembangun aturan main ekonomi-perdagangan internasional menjadi peserta penting dan kontributor aktif. Tarif rata-rata Tiongkok turun dari 39,5% pada awal keanggotaan menjadi 15,3%, sementara tarif rata-rata keseluruhan di Asia-Pasifik turun dari 17% menjadi sekitar 5%. Tiongkok termasuk yang pertama meratifikasi RCEP dan secara aktif mendorong proses bergabung dengan DEPA serta CPTPP. Setelah RCEP berlaku, proporsi perdagangan barang antara di kawasan naik dari 65% pada 2021 menjadi 68,3% pada 2024, sedangkan skala perdagangan intra-kawasan meningkat dari 4,43 triliun dolar AS menjadi 6,09 triliun dolar AS, dengan kenaikan 24%. Hasil keterbukaan kelembagaan ini diperoleh Tiongkok melalui penyelarasan aturan dan akses pasar yang nyata, bukan tumpukan retorika.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

CPNS 2026 Siapkan 150 Ribu Formasi, Menteri PANRB Sebut Program Prioritas Presiden Prabowo Jadi Fokus Penempatan

Oleh Van · 10 Nov, 15.16 WIB



Menteri PANRB saat menyampaikan arahan penting dalam sebuah rapat koordinasi.

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini menyebut bahwa pemerintah berencana membuka sekitar 150 ribu formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.

Namun, kepastian jumlah formasi CPNS 2026 masih dalam tahap penghitungan ulang bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Yang dibuka mungkin, kami sedang menghitung ulang lagi, mungkin sekitar 150 ribuan,” kata Menteri PANRB, Rini Widyantini kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Senin, 9 November 2026.

Formasi CPNS 2026 Diprioritaskan untuk Program Presiden

Rini menjelaskan, seleksi CPNS 2026 akan difokuskan untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau prigram prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah program yang menjadi prioritas dalam rekrutmen tersebut antara lain Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat Terintegrasi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga polisi hutan.

“Difokuskan kepada program hasil terbaik cepat Bapak Presiden, misalnya sekolah terintegrasi, terus sekolah Unggulan Garuda, polisi hutan dan banyak lagi,” terangnya.

Kebutuhan pegawai nantinya juga akan disesuaikan dengan program dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing instansi pemerintah.

Sehingga, kata Rini, formasi CPNS 2026 tidak hanya terpusat pada kementerian tertentu, tetapi juga akan tersebar di berbagai instansi pemerintah sesuai kebutuhan.

“CPNS itu dipersiapkan untuk mengisi program hasil terbaik cepatnya Presiden. Jadi semua instansi pemerintah dapat,” imbuhnya.

Lulusan Baru Berpeluang Ikut Seleksi CPNS 2026

Selain memenuhi kebutuhan program prioritas, pemerintah juga ingin memberikan kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate untuk mengikuti seleksi CPNS 2026 mendatang.

Sementara itu, peluang bagi lulusan SMA dan SMK masih menunggu usulan dari masing-masing instansi, karena kualifikasi pendidikan akan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan jabatan.

“SMA tergantung dari usulannya. Karena pegawai itu tergantung daripada kompetensi yang dibutuhkan, saya masih menunggu dari instansi pemerintah,” jelas Rini.

Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu pemetaan kebutuhan pegawai dari kementerian dan lembaga pemerintah sebelum menetapkan rincian formasi.

“Kalau memang kompetensinya dibutuhkannya, ya kita. Saya masih menunggu dari instansi pemerintah. Kan ada yang terampil, ada yang ahli,” sambungnya.

Kapan Formasi CPNS 2026 Diumumkan?

Terkait jadwal, Menteri PANRB itu menyebut pemerintah tengah mengupayakan pengumuman seleksi CPNS 2026 dapat dilakukan pada November ini.

“Pembukaannya saya akan berusaha November ini sudah bisa diumumkan kepada seluruh peserta.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DIGITAL

Irfan Ghafur Sindir Raffi Ahmad soal Bayaran Insta Story Rp575 Juta: Kenyang Banget Tuh Raffi!

Oleh Redaksi · 10 Nov, 12.49 WIB





BANDA ACEH - Konten kreator, Irfan Ghafur turut menyoroti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemerintah senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan PT Rans Animasi Indonesia.Perusahaan tersebut memiliki keterkaitan dengan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Dalam sorotannya, Irfan Ghafur secara khusus menyinggung anggaran sebesar Rp575.655.000 untuk penayangan Instagram Story melalui akun @raffinagita1717.

Melalui unggahannya di Threads-nya, Irfan mempertanyakan besarnya anggaran tersebut jika dibandingkan dengan hasil konten promosi yang ditampilkan.

"Instagram story 575jt, videonya 3M. Mana video outputnya gitu doang, mendekati video visit selebgram kabupaten aja enggak! Kenyang banget tuh raffi ahmad. Udah gila ini negara," tulis Irfan.

Unggahan Irfan tersebut kemudian ramai diperbincangkan dan mendapat perhatian warganet.

Salah satu warganet memberikan tanggapan dengan mengingatkan agar nilai pengadaan tidak serta-merta dianggap sebagai biaya untuk satu pekerjaan atau satu hasil produksi.

Menurut akun @indovolix, angka tersebut perlu dilihat sebagai akumulasi keseluruhan nilai kontrak, termasuk ruang lingkup pekerjaan, jumlah hasil produksi, durasi kontrak hingga komponen layanan lainnya.

"Menurutku, angka tsb hrs dilihat sbg akumulasi keseluruhan nilai kontrak dan bukan serta-merta dianggap sebagai biaya untuk satu item SOW. Rasanya juga nggak masuk akal kalau nominal sebesar itu hanya dialokasikan utk satu pekerjaan atau satu output saja. Perlu dilihat rincian ruang lingkup pekerjaan, jumlah deliverables, durasi kontrak, hingga komponen layanan yg termasuk di dalamnya. Jadi, jgn sampai angka total kontrak dibaca seolah-olah merupakan harga satu item pekerjaan dong," tulis akun tersebut.

Namun, Irfan tetap mempertanyakan nominal anggaran untuk penayangan Instagram Story tersebut.

Ia menilai biaya sebesar Rp575 juta untuk konten Instagram Story tetap tidak masuk akal.

"Ya tetap tetap ngapain buat instastory doang 575jt??? Ga masuk akal," balas Irfan.

OPINI

Penyadapan dan Nyanyian Ahrie Sonta: Buyarnya Skenario Makar Geng Solo?

Oleh Redaksi · 10 Nov, 15.06 WIB



Oleh: Edy Mulyadi((Wartawan Senior))

OTAK pandora itu akhirnya retak juga. Paling tidak, begitu kira-kira yang bakal segera terjadi.

Pernyataan Krisna Murti, pengacara Irjen Ahrie Sonta Nasution, benar-benar bikin panggung belakang Politik nasional mengalami gempa tektonik. Sonta mengaku siap buka-bukaan soal skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Lebih menarik lagi, menurut Krisna, Sonta bernyanyi tanpa tekanan. Tak ada intimidasi sepanjang proses penyidikan.

Artinya apa?

Ini kesaksian murni yang bakal meluncur deras dalam penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP). Juga bukan tidak mungkin, keterangannya kelak akan bergema di ruang sidang.

Apakah ini strategi penyelamatan diri?

Jelas, tentu. Kita mengenalnya sebagai justice collaborator. Tersangka, terdakwa, atau terpidana suatu tindak pidana tertentu yang bersedia bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap kejahatan tersebut.

Istilah ini merujuk pada UU Nomor 31 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Aturan lainnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Tapi apa pun sebutannya, bagi publik, nyanyian Sonta adalah pintu masuk menuju episentrum gempa. Ini jelas membuat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan kroninya ketar-ketir. Pembelaan bersama (joint defense) mereka dipastikan bubar jalan.

Sonta bukan lagi sekadar saksi. Dia adalah mesin penghancur skenario. Jika Sonta membongkar alur operasional server Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri, maka jejak digital sang dalang utama tidak akan bisa disembunyikan.

Makar yang Teraborsi

Ingat, ini bukan sekadar urusan kuping menguping omongan presiden. Juga bukan cuma memantau pergerakan Prabowo. Ini jauh lebih mengerikan.

Badan Intelijen Negara (BIN) dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sudah blak-blakan.

Penyadapan ini hanyalah bagian kecil dari skenario besar yang sudah mengarah pada tindakan makar.

Ya, makar!

Sebuah upaya terencana dan sistematis untuk merongrong, mendelegitimasi, dan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kita percaya, terbongkarnya penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden adalah campur tangan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dia punya cara sendiri untuk menyelamatkan rakyat Indonesia, dan Prabowo, dari persekongkolan jahat para pelaku. Dengan terbongkarnya penyadapan, upaya makar mereka dipaksa aborsi.

Di sinilah letak poin krusialnya.

Siapa dalang utama di balik penyadapan ilegal itu?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DIGITAL

Salsa Erwina Hutagalung: Rakyat Disuruh Puasa, Raffi Ahmad Pesta

Oleh Redaksi · 10 Nov, 12.55 WIB



Utusan Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad bersama Istrinya Nagita Slavina. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad memicu kritik dari konten kreator sekaligus aktivis Salsa Erwina Hutagalung.

Ia menyoroti kontrak dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia sepanjang 2024–2026, terutama di tengah isu efisiensi yang berdampak pada ribuan pegawai pemerintah.

Melalui akun Threads, Salsa mempertanyakan penggunaan uang negara untuk membayar jasa influencer dengan nilai fantastis.

"Rp14,7 MILIAR. Uang pajak kita. Masuk ke perusahaan Raffi Ahmad, buat jasa influencer. Sementara di NTT, 9.000 PPPK mau dilepas. Alasannya? Efisiensi. 9.000 orang terancam kehilangan kerja. Sementara tayangan Instagram Story Raffi dibayar Rp575 juta, lebih mahal dari sisa dana desa untuk DUA desa. Datang ke acara? Rp2,5 miliar," tulisnya di akun Threads, dikutip Selasa (10/11/2026)

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang besarnya nilai kontrak, tetapi juga berkaitan dengan rangkap posisi Raffi sebagai bagian dari pejabat negara.

"Rakyat disuruh puasa. Raffi Ahmad pesta. Yang paling busuk: Raffi bukan sekadar artis. Dia PEJABAT NEGARA. Utusan Khusus Presiden. Komisaris di perusahaan yang dikontrak. Sejak dilantik, KKP 3x ngontrak perusahaannya: Rp10,8 miliar," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan ketika perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat negara justru menjadi penyedia jasa bagi kementerian.

Salsa membandingkannya dengan larangan bagi menteri untuk merangkap sebagai komisaris perusahaan swasta.

"Menteri aja dilarang jadi komisaris swasta. Ini pejabat, perusahaannya malah jadi vendor negara. Duduk di kursi kekuasaan, kebagian kontrak. 'Jangan pakai uang negara' katanya. Ternyata maksudnya: jangan pakai uang negara, kecuali buat RANS," ungkap Salsa.

"Siapa yang didzalimi disini? Rakyat? Pegawai dipecat karna efisiensi? RA?" imbuh dia.

Lebih lanjut, Salsa sebenarnya mengaku tidak mempermasalahkan penggunaan influencer sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Namun, ia menilai besarnya anggaran yang dikeluarkan negara perlu dipertanyakan, termasuk efektivitas kampanye dan kelayakan perusahaan milik pejabat negara menerima kontrak pemerintah.

"Mau pakai influencer buat menyebar pesan? Gak masalah! Tapi masa iya sebesar itu uang rakyat dipakai? Dan masa iya udah digaji jadi utusan presiden terus mau juga nerima uang ke perusahaan miliknya? Apa dampaknya? Seberapa efektif pesannya tersebar?" tutupnya.

LIFESTYLE

Ayona Villa Canggu, Referensi Villa di Canggu untuk Liburan

Oleh Redaksi · 10 Nov, 12.20 WIB



Gambar ini menampilkan kolam renang biru jernih dengan dek kayu yang elegan dan kursi santai modern. Di sisinya terdapat dinding batu abu-abu yang tinggi dan berbagai tanaman hijau subur yang memberikan nuansa alami yang tenang. FOTO/finivie.com

BALI - Rekomendasi villa di Canggu, Bali untuk liburan bersama pasangan, Ayona Villa Canggu. Cek sekarang juga.

Bali telah lama dikenal sebagai destinasi liburan favorit, baik untuk pasangan yang mencari momen romantis maupun keluarga yang ingin berlibur bersama. Dalam perjalanan semacam ini, pilihan akomodasi berperan penting karena turut menentukan suasana selama berlibur.

Bagi wisatawan yang menjadikan Canggu sebagai tujuan utama, menginap di lokasi strategis akan memudahkan akses ke berbagai destinasi di sekitarnya. Salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan adalah Ayona Villa Canggu.

Lokasi Ayona Villa Canggu

Ayona Villa Canggu dikelola oleh iNi ViE Hospitality dan berlokasi di Gang Anggrek VI No. 8A, Canggu. Sebagai salah satu pilihan villa di Canggu, properti ini berada di kawasan bernuansa tropis yang tergolong tenang, tetapi tetap dekat dengan pusat keramaian Canggu dan Berawa.

Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, jarak menuju vila sekitar 15 hingga 18 kilometer. Perjalanan umumnya memakan waktu 45 hingga 60 menit.

Posisi strategis ini memudahkan tamu menjangkau sejumlah destinasi populer. Pantai Berawa, Pantai Nelayan, Atlas Beach Fest, dan Finns Beach Club dapat ditempuh dalam 5 hingga 10 menit berkendara, sedangkan Pantai Batu Bolong dan Echo Beach berjarak kira-kira 10 hingga 12 menit.

Di sekitar vila juga berderet kafe brunch dan restoran ternama di kawasan Berawa. Adapun Seminyak dapat dicapai dalam 15 hingga 20 menit, dan Pura Tanah Lot dalam 20 hingga 25 menit.

Villa dengan Kolam Renang Pribadi

Ayona Villa Canggu menyediakan lima tipe vila dengan keunggulan masing-masing. Seluruhnya dilengkapi dengan kolam renang pribadi.

1. Two-Bedroom Connecting Pool Villa

Tipe terluas di Ayona ini berukuran 260 m^2 dengan dua tempat tidur king dan kapasitas untuk dua orang dewasa serta dua anak. Villa ini cocok bagi keluarga atau dua pasangan yang berlibur bersama tanpa mengorbankan privasi.

2. Sky One Bedroom Pool Villa

Vila berukuran sekitar 160 m^2 ini menghadirkan pemandangan hutan dan kolam renang pribadi, sedangkan bathtub-nya berada di lantai atas. Suasananya lapang dan berkelas, sehingga cocok bagi pasangan yang mendambakan pengalaman bulan madu yang lebih istimewa.

3. Grand One Bedroom Private Pool Villa

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA Adam
REDAKTUR Hayat
SEKRETARIS REDAKSI Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin